

## KATA PENGANTAR

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dimana setiap Instansi Pemerintah wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan suatu media pertanggung jawaban yang sistematis yang dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan aparatur organisasi perangkat daerah terhadap pelaksanaan peraturan dan prosedur yang berlaku, serta menggambarkan mengenai kemajuan pengevaluasian kinerja secara transparan di setiap penentuan kebijakan dalam pengambilan keputusan yang dikerjakan mengacu sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

Selain itu dapat menggambarkan tentang efisien dan efektivitas biaya, serta kedisiplinan dan ketaatan terhadap jadwal kegiatan yang telah disusun yang merupakan langkah strategis dan tindakan operasional untuk merealisasikan capaian kinerja dan capaian sasaran.

Sejalan dengan adanya ketentuan tersebut, maka dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban kinerja secara transparan dan akuntabel mengenai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2020, dalam rangka upaya mewujudkan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut.

Ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut tahun 2020, Semoga Allah SWT memberikan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua.. Aamiin..

Pelaihari, Agustus 2020  
Plt. Kepala Dinas P2KBP3A  
Kabupaten Tanah Laut,

**Drs. ZAINAL ABIDIN**  
NIP. 19641013 198603 1 012

## IKHTISAR EKSEKUTIF

### **Mekanisme Penyusunan**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Program dan kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (TAP MPR XI/1998 & UU No.28 Tahun 1999).

### ➤ **Mekanisme Pengukuran**

Prioritas kebijakan pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut adalah “Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program pengendalian penduduk KB, Ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta meningkatkan perlindungan perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Diskriminasi”.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2020 telah menetapkan 4 (empat) tujuan, 9 (sembilan) sasaran strategis.

Ke 9 (Sembilan) sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 9 (Sembilan) indikator kinerja.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

- Ringkasan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut :

Ikhtisar pencapaian sasaran tahun 2020 sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut yang mendukung kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yaitu Pro Poor / Pro Job dan SDG's. Selain itu, juga mendukung kebijakan strategis Pemerintah Pusat yaitu Pro Poor dan SDG's, capaian kinerja dengan perincian untuk:

- **Sasaran Satu (1):** Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dengan indikator adalah :
  - ✓ Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) realisasi 1,21 dari target 1,66 dengan capaian kinerja 72,89%.
- **Sasaran Dua (2) :** Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS 15-49 tahun dengan indikator adalah :
  - ✓ Persentase Total Fertility Rate (TFR) realisasi 2,99% dari target 2,33% dengan capaian kinerja 126,32%
- **Sasaran Tiga (3) :** Meningkatnya Kesetaraan Gender dengan indikator adalah :
  - ✓ Persentase Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) realisasi 65,96% dengan capaian kinerja 96,43%

- **Sasaran Empat (4) :** Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dengan indikator adalah :
  - ✓ Skor capaian Kota Layak Anak (KLA) realisasi skor 551 (Pratama ) dari target 700 (Madya) dengan capaian kinerja 78,71%.
- **Sasaran Lima (5):** Meningkatnya Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga dengan indikator adalah :
  - ✓ Persentase Data Mikro Keluarga di Desa/Kelurahan realisasi 100% dari target 100% dari 134 Desa terpenuhi dokumen laporan data;
- **Sasaran Enam (6) :** Meningkatnya Pemahaman Pasangan Usia Subur tentang ber KB dengan indikator adalah :
  - ✓ Persentase PUS yang ber KB realisasi 83,60 % dari target 90 % dengan capaian kinerja 107,51%;
- **Sasaran Tujuh (7) :** Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan indikator adalah :
  - ✓ Persentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) terealisasi 8,12% dari target 9,00 % dengan capaian kinerja 90,22%;
- **Sasaran Delapan (8) :** Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak dengan dua indikator adalah :
  - ✓ Persentase penanganan pengaduan tindak kekerasan perempuan (19) kasus dengan capaian 100% dari yang melapor 19 kasus tertindaklanjuti 100%.
  - ✓ Persentase penanganan pengaduan tindak kekerasan Anak (15) kasus dengan capaian 100% dari yang melapor 15 kasus tertindaklanjuti 100%.
- **Sasaran Sembilan (9) :** Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dengan indikator adalah :
  - ✓ Prosentase tata kelola administrasi perkantoran dengan capaian 100% dari target 100% dengan capaian kinerja 100%.

**Pemanfaatan Laporan Kinerja untuk :**

- Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan;

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi .....	5
C. Isu Strategis .....	5
D. Produk dan Layanan .....	9
E. Sistematika Penyajian .....	11
<b>BAB II    PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A. Visi RPJMD .....	13
B. Misi RPJMD .....	13
C. Tujuan Sasaran Strategis .....	13
D. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	14
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	17
F. Program dan Kegiatan .....	17
<b>BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi .....	24
1. Sasaran RPJMD .....	46
2. Esselon.II(Kepala.Dinas).....	46
3.Esselon III ( Sekretaris/ Kepala Bagian) A.....	PM
1) <i>Esselon IV(Kasubag Umum dan Kepegawaian) A,1 PM</i>	
2) <i>Esselon IV ( Kasubbag Perencanaan dan Keuangan) A.2</i>	
A. Kendala yang dihadapi atas capaian k/ Karja organisasi....	79
B. Strategi Peningkatan Kinerja .....	80
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu strategi pokok pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023. Pengendalian Penduduk, KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan strategi untuk mencapai penurunan laju penduduk (LPP), angka kelahiran (Total Fertility Rate /TFR), keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan kependudukan , KB, perempuan dan perlindungan anak ke dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pengendalian Penduduk, KB dan Pengarusutamaan gender ditujukan agar semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses penurunan laju penduduk (LPP) dan perempuan terhadap program pembangunan.

Keberhasilan pencapaian pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian pembangunan ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan sumber daya manusianya. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus- menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup. Ketertinggalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang seringkali saling berkaitan satu dengan lainnya. Persoalan yang paling penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak maka dipandang perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang salah satunya adalah Dinas pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut. Sesuai dengan Perda Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembentukan, SOTK Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat betapa pentingnya pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Tanah Laut, maka dituntut kepedulian konkret lebih besar dengan menempatkannya sebagai salah satu bidang program dengan tujuan pengendalian penduduk, KB, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Tanah Laut, tidak terbatas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan proyek pembangunan.

Dasar dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut ini ialah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pasal 28 I ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif;
7. Undang-Undang Dasar RI Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita;
8. Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada pasal 3 disebutkan bahwa "Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat";
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu terutama pada bagian keterwakilan perempuan 30 % di parlemen;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
12. Tap MPR RI Nomor 4 / MPR / 1999 tentang GBHN 1999, dijelaskan bahwa bidang sosial dan budaya, kedudukan dan peranan perempuan terdiri dari :
  - Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan Kesetaraan dan Keadilan Gender ( KKG ).
  - Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan, serta nilai historis perjuangan perempuan dalam melanjutkan usaha

pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat

13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
17. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Exploitasi Seksual Komersial Anak;
19. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking perempuan dan anak);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Daerah;
22. Peraturan Bersama Tiga Menteri : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/Men-PP/Dep.II/VII/2005, Nomor 1/PB/2005 tanggal 18 Juli 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
23. Kesepakatan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Kesehatan dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tanggal 12 Maret 2002 tentang Gerakan Sayang Ibu;
24. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Sosial Nomor : 75/HUK/2002 perihal : Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;

25. Komitmen Sentani dalam memerangi HIV/AIDS di Indonesia antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI dengan Gubernur 7 (Tujuh) Daerah tanggal 19 Juni tahun 2004;
26. Nota Kesepahaman antara Departemen Sosial RI, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Departemen Komunikasi dan Informasi RI dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Dan Plan Indonesia Nomor : K. Tel. 232/HK 840/UTP cc/06 dan Nomor : 206/Plan/CO/CD/VII/2006.
27. Peraturan kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 143/HL-010/B5/2009.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut;

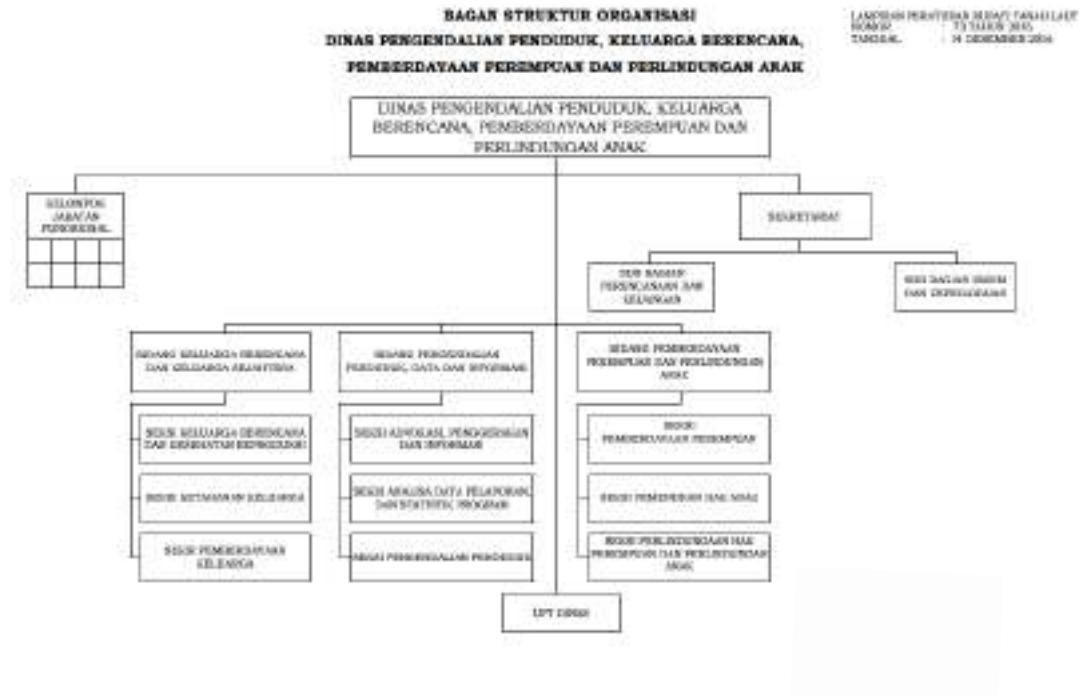
Adapun Tujuan dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut ini ialah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## **B. STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI**

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada bagan beserta uraian tugas sebagai berikut :



Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembentukan, SOTK Dinas pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut :

1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak mempunyai fungsi : Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas;
  - e. Balai Penyuluhan KB; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
3. Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
    - (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan;
    - (2) Seksi Pemenuhan Hak Anak;
    - (3) Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak.
  - d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
    - (1) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
    - (2) Seksi Keluarga Berencana;
    - (3) Seksi Pemberdayaan Keluarga.
  - e. Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi, terdiri dari :

- (1) Seksi Advokasi, Penggerakan dan Informasi ;
  - (2) Seksi Analisa Data Pelaporan dan Statistik Program;
  - (3) Seksi Pengendalian Penduduk.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Kondisi Kepegawaian

Tabel 1.1 : Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan  
Tahun 2020

No.	JABATAN	Gol.			Perempuan	
			Eselon	Formasi	L	P
1	Kepala Dinas	IV/ c	II.b	1	0	1
2	Sekretaris	IV/b	III.a	1	1	0
3	Kabid	IV.a	III.b	3	1	2
4	Kasubbid	III/d	IV.a	8	2	6
5	Koordinator Balai Penyuluhan KB Kecamatan	III / c	IV.a	11	8	3
6	Fungsional Umum	III / b	IV.b	11	7	4
		<b>Jumlah</b>		<b>35</b>	<b>19</b>	<b>16</b>

Tabel 1.2 : Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan

No.	Jenis Pendidikan	Satuan	Laki-Laki		Perempuan	
			2017	2018	2017	2018
1	S	Orang	2	2	1	1
2	S 1	Orang	9	9	15	15
3	D 3	Orang	2	2	3	3
4	SLTA	Orang	3	3	1	1
5	SLTP	Orang	1	1	0	0
	<b>Jumlah</b>	Orang	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

### C. ISU STRATEGIS

Isu strategis pada Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

1. Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk ;
2. Tingginya TFR (Total Fertility Rate ;
3. Belum optimalnya penyediaan informasi data mikro keluarga ;
4. Masih rendahnya pemahaman Pasangan Usia Subur tentang ber-KB;
5. Belum optimalnya pelayanan KB dan keluarga Sejahtera;
6. Belum optimalnya kesetaraan gender ;
7. Belum optimalnya perlindungan perempuan dan Anak ;
8. Masih ditemukan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak ;
9. Belum optimalnya tata kelola administrasi perkantoran

### D. PRODUK DAN LAYANAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana maka produk dan layanan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) ;
2. Menurunkan Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15—49 tahun);
3. Meningkatnya Penyediaan Informasi Data Mikro ;
4. Meningkatnya Pemahaman Pasangan Usia Subur tentang ber KB;

5. Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
6. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi;

.Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka produk dan layanan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesetaraan gender /Indeks Pemberdayaan Perempuan ( IDG) ;
2. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak ;
3. Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak;

Dari kegiatan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut dapat meningkatkan capaian indikator kinerja organisasi serta dalam melaksanakan kegiatan tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak selalu berpedoman kepada Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dan Undang-undang Dasar RI nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan, Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT).

Capaian indikator kinerja yang strategis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut adalah :

1. Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) realisasi 1,21 dari target 1,66 dengan capaian kinerja 72,89%.
2. Persentase Total Fertility Rate (TFR) realisasi 2,99% dari target 2,33% dengan capaian kinerja 126,32%
3. Persentase Data Mikro Keluarga di Desa/Kelurahan realisasi 100% dari target 100% dari 134 Desa terpenuhi dokumen laporan data ;

4. Persentase PUS yang ber KB realisasi 83,60 % dari target 90 % dengan capaian kinerja 107,51%;
5. Persentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) terealisasi 8,12% dari target 9,00 % dengan capaian kinerja 90,22%;
6. Prosentase tata kelola administrasi perkantoran dengan capaian 100% dari target 100% dengan capaian kinerja 100%.
1. Persentase Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) realisasi 65,96% dengan capaian kinerja 96,43% dengan indikator kompositnya adalah : dengan indikator kompositnya adalah :
  - Prosentase keterlibatan perempuan di parlemen
  - Prosentase perempuan Pengambilan Keputusan dan perempuan sebagai tenaga profesional
  - Prosentase Sumbangan Pendapatan Perempuan
2. Skor capaian Kota Layak Anak (KLA) realisasi skor 551 (Pratama ) dari target 700 (Madya) demgan capaian kinerja 78,71%.
3.
  - Persentase penanganan pengaduan tindak kekerasan perempuan (19) kasus dengan capaian 100% dari yang melapor 19 kasus tertindaklanjuti 100%.
  - Persentase penanganan pengaduan tindak kekerasan Anak (15) kasus dengan capaian 100% dari yang melapor 15 kasus tertindaklanjuti 100%.

#### **D. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pertanggung jawaban kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama tahun 2020. Sistematis penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut berpedoman Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN,** Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi Organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategi organisasi tentang Latar Belakang, Kedudukan , Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Strategis, Struktur Organisasi serta Sistematika Penyajian.

**BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KERJA,** menjelaskan secara ringkas dokumen perjanjian kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Tahun 2019 – 2023.

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA,** menjelaskan terkait dengan capaian kinerja organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

**BAB IV PENUTUP,** menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

**LAMPIRAN –LAMPIRAN**



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **B. VISI RPJMD**

Dalam mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Tanah Laut terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut adalah yaitu : **“TERWUJUDNYA TANAH LAUT YANG BERINTERAKSI (Berkarya, Inovatif, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi).**

#### **B. MISI RPJMD**

Untuk mewujudkan misi Bupati Tanah Laut terkait tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut mewujudkan **3 (Misi)** yaitu :

1. **Misi ke I (Satu)** yaitu Berkarya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Masyarakat yang Berbasis Teknologi untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
2. **Misi ke 3 (Tiga)** yaitu Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance);
3. **Misi ke 5 (Lima)** yaitu Membangun Sinergitas yang Baik antar Tingkat Pemerintahan dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;

#### **C. TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS**

**Tujuan** Adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Keberlangsungan ber KB Serta Pengendalian Angka Kelahiran.
2. Meningkatkan Peran Perempuan Dalam Pembangunan
3. Terwujudnya Perlindungan Perempuan dan Anak

4. Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran, Perencanaan dan Keuangan yang Baik.

**Sasaran** merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sasaran yang akan dicapai sesuai Renstra 2019-2023 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut adalah :

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP);
2. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun);
3. Meningkatnya Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga ;
4. Meningkatnya Pemahaman Pasangan Usia Subur Tentang Ber Kb;
5. Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
6. Meningkatnya Kesetaraan Gender;
7. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak;
8. Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak;
9. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran.

**Berikut Tabel Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Sasaran RPJMD	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					
							2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target Akhir Renstra
Misi 1 : Berkarya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Masyarakat yang Berbasis Teknologi untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terwujudnya Keberlangsungan ber KB serta Pengendalian Angka Kelahiran	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,56	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.78	1.66	1.63	1.61	1.58	1.56	1.56
		Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 Tahun)	2,22	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	%	2,33	2,33	2,30	2,27	2,24	2,22	2,22
				Meningkatnya Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga (Eselon 3)	Persentase Data Mikro Keluarga di Desa/Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100
				Meningkatnya Pemahaman Pasangan Usia Subur tentang ber KB (Eselon 3)	Persentase Pasangan Usia Subur yang ber KB	%	90	90	90	90	90	90	90

				Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (Eselon 3)	Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	9	9	9	9	9	9	9
Misi 5 : Membangun Sinergitas yang Baik antar Tingkat Pemerintahan dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,48	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Persentase Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	68,38	68,40	68,42	68,44	68,46	68,48	68,48
	Terwujudnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Skor Capaian Kota Layak Anak (KLA)	700	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Skor Capaian Kota Layak Anak (KLA)	skor	550	700	700	700	700	700	700
				Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak (Eselon 3)	Persentase Penanganan Pengaduan	%	100	100	100	100	100	100	100

Misi 3 : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran, Perencanaan dan Keuangan yang Baik	Persentase Tata Kelola Administrasi Perkantoran, Perencanaan dan Keuangan yang Baik	100	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran	Persentase Tata Kelola Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100
---	--	---	-----	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

#### D. Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	1,63%
2	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	2,30%
3	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Persentase Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,42%
4	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Skor Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Skor 700

#### E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi seperti yang tertera pada tabel berikut :

**Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2020
<b>Eselon II</b>			
1.	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	1,63 %

2.	Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 Tahun)	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	2,30 %
3.	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Persentase Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,42 %
4.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Skor capaian KLA	700 skor
<b>Eselon III</b>			
1.	Meningkatnya Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga	Persentase Data Mikro Keluarga di Desa/Kelurahan	100%
2.	Meningkatnya Pemahaman Pasangan Usia Subur tentang ber KB	Persentase Pasangan Usia Subur yang ber KB	90 %
3.	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	9%
4.	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak	Persentase Penanganan Pengaduan	100%
5.	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran	Persentase Tata Kelola Administrasi Perkantoran	100 %
<b>Eselon IV</b>			
<b>Kepala Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi</b>			
1.	Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan ,pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi	Jumlah alat obat kontrasepsi yang tersedia	23 Faskes (Fasilitas Kesehatan)
2.	Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Jumlah PUS yang ber-KB	61.548 PUS
3.	Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis kesertaan ber -KB	Jumlah balai KB yang dibina dan di bimbing	11 Balai KB
4.	Mengumpul, mengolah dan menyajikan data keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen data keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi	1 Dokumen
5.	Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi KB dan KR	Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	44 kali (11 kecamatan)
<b>Kepala Seksi Ketahanan Keluarga</b>			
1.	Melaksanakan pembinaan kelompok BKB, BKR dan BKL	Jumlah pembinaan kelompok BKB, BKR dan BKL	50 Kelompok
2.	Melakukan fasilitasi lomba BKB	Jumlah kelompok BKB yang mengikuti lomba	70 BKB

3.	Melaksanakan lomba keluarga harmonis	Jumlah keluarga harmonis yang mengikuti lomba	5 keluarga harmonis
<b>Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga</b>			
1.	Melaksanakan pembinaan pemberdayaan Ekonomi keluarga	Jumlah kelompok UPPKS yang dibina	55 Kelompok
2.	Melaksanakan penilaian lomba UPPKS	Jumlah kelompok UPPKS yang dinilai	55 Kelompok
3.	Melaksanakan pelatihan tentang UPPKS	Jumlah kelompok UPPKS yang dilatih dan administrasi menjadi baik	55 Kelompok
<b>Kepala Seksi Pengendalian Penduduk</b>			
1.	Melaksanakan sosialisasi program pengendalian penduduk	Jumlah mitra kerja yang mengikuti sosialisasi Pengendalian penduduk	10 Mitra Kerja
2.	Melaksanakan pembinaan/sosialisasi Kampung KB	Jumlah Desa kampung KB yang mengikuti pembinaan/Sosialisasi	22 Kampung KB
3.	Melaksanakan pembinaan/sosialisasi Rumah Dataku	Jumlah Rumah Dataku yang mengikuti pembinaan/Sosialisasi	22 Rumah Dataku
4.	Melaksanakan pembinaan/fasilitasi program Gen-Re ( Generasi remaja )	Jumlah kelompok PIK ( Pusat Informasi Konseling)	40 kelompok PIK
5.	Melaksanakan kerjasama Koordinasi / fasilitasi bersama koalisi kependudukan	Jumlah kerja sama koordinasi tentang koalisi kependudukan	7 kali koordinasi
6.	Melaksanakan pembinaan/fasilitasi Sekolah Siaga Kependudukan ( SSK)	Jumlah pembinaan Sekolah Siaga Kependudukan ( SSK)	5 kali
7.	Melaksanakan kerja sama/fasilitasi dengan FAPSEDU( Forum Antar Ummat beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan )	Jumlah kegiatan FAPSEDU	6 kali
<b>Kepala Seksi Analisa Data, Pelaporan dan Statistik Program</b>			
1.	Melakukan falidasi / Verifikasi data & Informasi	Jumlah data dan statistik KB, PP dan PA	12 Kali
2.	Melakukan Bimtek petugas pengolah data penduduk	Jumlah petugas data penduduk yang di Bimtek	40 Petugas PLKB/PKB
3.	Melakukan pengentrian laporan pengendalian laporan dan pelayanan kontrasepsi	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan pelayanan kontarsepsi	11 Balai Penyuluh KB 24 Faskes
4.	Melakukan pembinaan dan monitoring pencatatan dan pelaporan	Jumlah pembinaan dan Monev pencatatan dan pelaporan	11 Balai Penyuluh KB
5.	Membuat dan menganalisa data program	Jumlah data program yang di analisis dan disajikan	11 Kecamatan
6.	Membuat laporan tahunan	Dokumen Laporan Tahunan	4 Dokumen

<b>Kepala Seksi Advokasi, Penggerakan dan Informasi</b>			
1.	Melakukan penyediaan media informasi KB	Jumlah informasi KB yang dapat di Upload dan di akses	6 Media
2.	Melakukan Monev kegiatan Advokasi, penggerakan dan informasi di balai Penyuluhan	Jumlah monev kegiatan Advokasi, penggerakan dan informasi di balai Penyuluhan	6 Kali Monev
3.	Melaksanakan kegiatan Advokasi, Pergerakan dan informasi di Balai Penyuluhan KB	Jumlah kegiatan Advokasi, Pergerakan dan informasi di Balai Penyuluhan KB	11 Balai Penyuluhan KB
4.	Melakukan pembinaan kepada Tim Website Kabupaten	Jumlah pembinaan kepada Tim Website Kabupaten	12 kali
5.	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.	Jumlah koordinasi dengan instansi terkait	8 kali
<b>Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan</b>			
1	Melakukan pembinaan pemberdayaan perempuan	Jumlah kelompok home industri perempuan yang dibina	38 kelompok
2	Melakukan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	40
3	Melaksanakan kegiatan hari-hari besar	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	5 kali
4	Melakukan koordinasi dengan organisasi perempuan	Jumlah Organisasi	15 organisasi
<b>Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak</b>			
1	Melaksanakan fasilitasi Jambore Forum Anak Daerah	Jumlah peserta Jambore FAD yang terfasilitasi.	2.500 peserta
2	Melakukan sosialisasi Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	Jumlah lembaga PUG dan Anak yang mengikuti Sosialisasi	3 kali Sosialisasi
3	Melakukan Bimtek Petugas KLA	Jumlah petugas KLA yang bersertifikat	25 Orang
4	Melaksana kegiatan rapat koordinasi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi	11 Kecamatan
5	Melaksanakan Monev tentang keterlibatan Forum Anak Daerah	Jumlah Monev tentang keterlibatan Forum Anak Daerah	3 Kali
<b>Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak</b>			
1	Melaksanakan fasilitasi penyelesaian kasus kekerasan perempuan dan Anak	Jumlah penyelesaian kasus kekerasan perempuan dan Anak	50 Kasus
2	Melaksanakan fasilitasi korban kasus yang berhubungan dengan hukum	Jumlah korban kasus yang berhubungan dengan hukum	50 kasus
3	Melaksanakan fasilitasi visum korban ke Rumah Sakit	Jumlah korban yang di visum ke Rumah Sakit	50 Kasus
<b>Kasubag. Umum dan Kepegawaian</b>			
1	Melakukan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah layanan administrasi perkantoran sesuai SOP	100%

2	Melakukan pemenuhan sarana prasarana kantor	Jumlah sarana prasarana kantor yang dipenuhi sesuai aturan	100%
3	Melakukan pemeliharaan sarana prasarana kantor	Jumlah sarana prasarana kantor yang terpelihara dan dimanfaatkan	100%
<b>Kasubag. Perencanaan dan Keuangan</b>			
1	Melakukan penyusunan laporan perencanaan dan keuangan	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang disusun tepat waktu	6 Dokumen
2	Menyusun laporan kinerja	Jumlah dokumen laporan kinerja	5 Dokumen

## F. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berbagai program dan kegiatan yang mendukung Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

No	Program	Uraian	Anggaran ( Rp)
<b>I</b>	<b>Program :</b>	<b>Pelayanan Adminitrasi perkantoran</b>	<b>814.985.554,-</b>
1	Kegiatan	Penyediaan jasa bahan,peralatan dan perlengkapan perkantoran	191.863.900,-
2	Kegiatan	Penyediaan rapat-rapat,konsultasi, dan koordinasi	250.622.861,-
3	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	372.498.793,-

<b>II</b>	<b>Program</b>	<b>Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Kinerja SKPD</b>	<b>20.000.000,-</b>
1	Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan	20.000.000,-
<b>III</b>	<b>Program</b>	<b>Pemenuhan,Peningkatan Sarana / Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya manusia</b>	<b>110.852.342,-</b>
1	Kegiatan	Pengadaan sarana dan prasaran perkantoran	20.150.000,-
2	Kegiatan	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	90.702.342,-
3	Kegiatan	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	0,
4	Kegiatan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0,
<b>IV</b>	<b>Program</b>	<b>Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD</b>	<b>7.010.600,-</b>
1	Kegiatan	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	3.554.100,-
2	Kegiatan	Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan kinerja	3.456.500,-
<b>V</b>	<b>Program</b>	<b>Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga Sejahtera</b>	<b>1.820.587.025,-</b>
1	Kegiatan	Pembinaan Masyarakat Peduli KB dan Kesehatan Reproduksi	0,-
2	Kegiatan	Monev Pelayanan KB dan Pengelolaan ALKON	292.329.000,-
3	Kegiatan	Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS)	1.472.539.900,-
4	Kegiatan	Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	55.718.125,-

<b>VI</b>	<b>Program</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Dan Anak</b>	<b>427.964.640,-</b>
1	Kegiatan	Pembinaan Pemberdayaan Perempuan, Organisasi Perempuan dan Kesetaraan Gender	320.158.735,-
2	Kegiatan	Pendampingan dan Penanganan Pelindungan Perempuan dan Anak	107.805.905,-
<b>VII</b>	<b>Program</b>	<b>Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak</b>	<b>94,199,720,-</b>
1	Kegiatan	Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan Anak	94,199,720,-
<b>VIII</b>	<b>Program</b>	<b>Advokasi dan Pengendalian Penduduk</b>	
1	Kegiatan	Advokasi dan KIE Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	70,846,900,-
2	Kegiatan	Monev dan Pendataan Keluarga	23.801.700,-
3	Kegiatan	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	81.502.732,-
<b>IX</b>	<b>Program :</b>	<b>Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Lini Lapangan</b>	<b>2.922.444.220,-</b>
1	Kegiatan	Operasional bagi Balai Penyuluhan KB (Dak Non Fisik)	958.010.120,-
2	Kegiatan	Operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi ( Alokon ) - ( Dak Non Fisik )	29.065.000,-
3	Kegiatan	Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan	862.528.000,-

		lainnya di Kampung KB ( Dak Non Fisik )	
4	Kegiatan	Operasional Pembinaan Program KKBPB bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD) ( Dak Non Fisik )	262.841.100,-
<b>X</b>	<b>Program :</b>	<b>Meningkatnya Dukungan Sarana Prasarana Pelayanan KB</b>	<b>126.500.000,-</b>
1	Kegiatan	Pengadaan sarana prasarana klinik pelayanan keluarga berencana (DAK Fisik)	126.500.000,-
<b>XI</b>	<b>Program :</b>	<b>Meningkatnya Dukungan Sarana dan prasarana Penyuluhan KB</b>	<b>469.200.000,-</b>
1	Kegiatan	Pengadaan sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan KB (DAK Fisik)	469.200.000,-
<b>T O T A L</b>			<b>6.989.895.433,-</b>

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja. Dinas P2KBP3A tahun 2020 yang telah disepakati. Untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas P2KBP3A beserta target dan capaian realisasi di rinci sebagai berikut :

#### 1. SASARAN RPJMD

No.	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya.	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,30	2,81	122,17	Jumlah perempuan lahir <b>dibagi</b> jumlah total Perempuan (15-49 thn) Kab. Tala x 5
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 20px;">                     5 x 0,45 ( Data didapat berdasar hasil susenas Tahun 2019 )                 </div> <div style="font-size: 2em; margin-right: 10px;">➔</div> <div> <math display="block">TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i</math> </div> </div>							

Total Fertility Rate(TFR) adalah hal yang wajib masuk dalam Indikator kinerja karena menyangkut pengendalian penduduk melalui pengaturan kelahiran, Pendewasaan Usia Perkawinan ( PUP ).

Angka Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur, kegunaan dari Angka Total Fertility Rate (TFR) yaitu merupakan gambaran mengenai rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan dari usia 15 sampai 49 tahun.

Target Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Tanah pada tahun 2020 sebesar **2,30%** terealisasi sebesar **2,81 %**

Dalam mencapai sasaran RPJMD Dinas P2KBP3A memiliki 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan yaitu program : **Advokasi dan Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga Sejahtera** kegiatan Advokasi dan KIE Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Pada sasaran program Advokasi dan Pengendalian Penduduk dengan indikator kinerja Menurunnya Laju Pertumbuhan ( LPP ) telah tercapai **... %** , dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian antara lain :

- Peningkat kerja sama lintas sektoral melalui kampung KB, TNI Manunggal dan Kesatuan gerak PKK-KKBPK- KB Kesehatan.



- Penyampaian informasi –informasi terkait program KKBPK ( Kependudukan Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga) melalui media cetak ( leaflet, banner, surat kabar), dan iklan layanan masyarakat KKBPK, media sosial ( Website, Instagram dan Face book) serta media luar lainnya ( pertemuan di wilayah bersama masyarakat dan MUPEN/Mobil Unit Penerangan).
- Pemberian edukasi kepada masyarakat tentang program KB melalui peningkatan peran FAPSEDU ( Forum Antar Ummat Beragama peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan dan IMP ( Institusi Masyarakat

Perkotaan ) dengan memberikan pelatihan/Workshop kepada kelompok FAPSEDU dan IMP terkait program KB dan memberikan operasional FAPSEDU dan IMP untuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada anggota keagamaan dan anggota masyarakat di wilayah masing-masing.

Pada sasaran program **Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga Sejahtera** dengan indikator Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need telah tercapai **... %**, dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian antara lain :

- Peningkatan kualitas pelayanan K<sub>b</sub> melalui distribusi alat dan obat kontrasepsi beserta sarana pelayanan KB kepada fasilitas kesehatan ( faskes) KB pemerintah dan swasta bekerja sama dengan perwakilan BKKBN Provinsi.

**Keterangan :** Foto Mobil Box Distribusi Alokasi untuk mengantar Alat dan obat kontrasepsi ke klinik tingkat desa.



- Peningkatan akses pelayanan KB gratis pelayanan KB bagi masyarakat bekerjasama dengan fasilitas kesehatan KB pemerintah dan swasta.

**Keterangan :** Foto Pemasangan Alat Kontrasepsi jenis Implant dan MOW. Pemasangan alat kontrasepsi modern jenis implan dan MOW dilakukan oleh Petugas/Bidan pada tanggal 03 September 2020.



Pada tahun 2020 Dinas P2KBP3A Kab.Tanah Laut telah melaksanakan fasilitas pelayanan KB gratis ; IUD, Implant, MOW, MOP, Pelepasan Implant, Pelepasan IUD dengan rincian realisasi sebagai berikut :

- IUD = 618 PUS
- Implant = 50 PUS
- MOW = 64 PUS
- MOP = 5 Akseptor
- Pelepasan Implant = 350 Akseptor
- Pelepasan IUD = 20 Akseptor

- Melakukan penyuluhan – penyuluhan tentang program KB di setiap kecamatan dan desa.



**Keterangan :** Foto Kegiatan Penyuluhan Kepada PUS yang punya Balita. Pertemuan dengan PUS yang baru lahir dan punya Balita di Kecamatan Panyipatan tanggal 14 Agustus 2020. Penyuluhan dilaksanakan oleh Kabid KB/KS tentang 8 fungsi Keluarga yang terdiri dari 1.Fungsi Agama, 2.Fungsi Sos-Bud,3.Fungsi Cinta kasih sayang, 4.Fungsi Perlindungan,5.Fungsi Reproduksi, 6.Fungsi Sosialisasi & Pendidikan, 7.Fungsi Ekonomi. 8.Fungsi Lingkungan dihadiri oleh Camat Panyipatan ,penyuluh dan para kader-kader KB.

No.	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET
2	Peningkatan kinerja pembangunan yang berkualitas	Indeks Pemberdayaan Gender ( <b>IDG</b> )	%	68,42	70,67	103,28	

	bidang ekonomi dan sosial budaya (pembangunan inklusif)						
	$1/3 (Ipar + IDM + linc-dist)$ <b><u>Keterangan :</u></b> Ipar = Indeks Keterwakilan diparlemen IDM = Indeks Pengambilan Keputusan Linc-dis = Indeks distribusi Pendapatan						

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indicator untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik dan sebagai tolak ukur keberhasilan program pengarusutamaan gender yang dilaksanakan oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut Target IDG pada tahun 2020 sebesar 68,42% terealisasi sebesar 70,67% dengan Capaian kinerja 103,28 %.

Dalam mencapai sasaran RPJMD Dinas P2KBP3A memiliki 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan yaitu program : **Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Dan Anak, Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**

Pada sasaran program **Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Dan Anak** dengan indikator Jumlah penyelesaian kasus kekerasan perempuan dan Anak telah tercapai 100 % , dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian antara lain :

- Melaksanakan fasilitasi penyelesaian kasus kekerasan perempuan dan Anak.
- Melaksanakan fasilitasi korban kasus yang berhubungan dengan hukum
- Melaksanakan fasilitasi visum korban ke Rumah Sakit.

.Pada tahun 2020 Dinas P2KBP3A Kab.Tanah Laut telah melaksanakan penyelesaian kasus sebanyak 35 dengan rincian realisasi sebagai berikut :

- ◆ Kekerasan pada perempuan = 16 kasus

◆ Kekerasana pada anak = 25 kasus

**Jumlah = 31 Kasus**

Pada sasaran program **Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak** dengan indikator Jumlah kelompok home industri perempuan yang dibina Jumlah lembaga PUG dan Anak yang mengikuti Sosialisasi telah tercapai 100 % , dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian antara lain :

- Melakukan pembinaan pemberdayaan perempuan,
- Melakukan sosialisasi Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak.
- Melakukan koordinasi dengan organisasi perempuan

Pada tahun 2020 Dinas P2KBP3A Kab.Tanah Laut telah melaksanakan dengan rincian realisasi sebagai berikut :

- Pembinaan pemberdayaan perempuan = 38 kelompok
- Sosialisasi Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak = 3 kali Sosialisasi
- Koordinasi dengan organisasi perempuan = 15 Organisasi

## 2. Esselon II ( Kepala Dinas )

### 1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)( Esselon II )

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian Kinerja	Catatan
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,63			2015=338.291 2016=340.909 2017=346.771 2018=347.893 2019=349.826

LPP = Jumlah penduduk tahun ini **dikurangi** Jumlah penduduk tahun kemarin x 100%

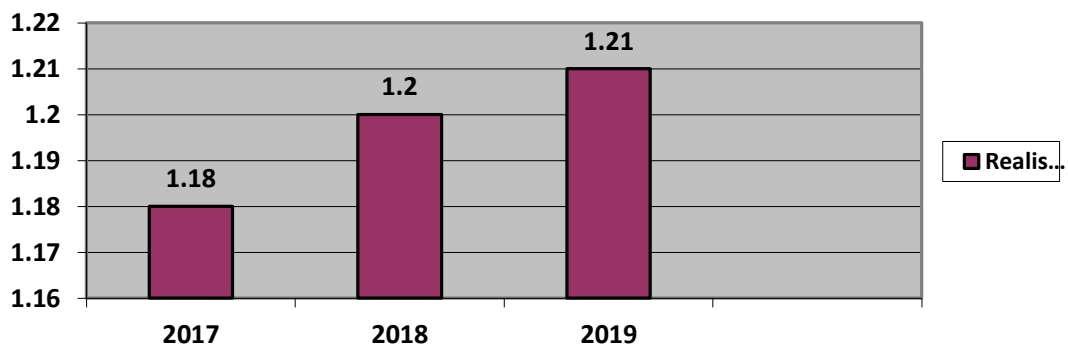


Tahun 2020 = **349.826 - Tahun 2018 = 347.893 x 100% = 1,21%**

Melihat rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tiap tahun selama enam (6) tahun dari data penduduk tercatat bahwa LPP Kabupaten Tanah Laut terjadi **kenaikan** dari kurun waktu 2015-2020 sebesar **....%** dari target Renstra **sebesar 1,63%**, sehingga capaian kinerja terdapat sebesar **.....%** ( Dapat dilihat pada Tabel di bawah ini )

Tabel : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TARGET RENSTRA 2023
1.	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk ( LPP)	1,18	1,20	1,21		1,56



Dalam mencapai sasaran Strategis Dinas P2KBP3A memiliki 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan yaitu program :Advokasi dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga Sejahtera kegiatan Advokasi dan KIE Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian sasaran antara lain :

**a. Faktor pendukung/Rencana Aksi dalam mencapai sasaran yaitu :**

1. Melaksanakan Advokasi Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE) secara keliling dengan menggunakan fasilitas mobil pelayanan (MUPEN).
2. Siaran lewat Siaran radio tentang Kependudukan, Memasang Spanduk-spanduk, mencetak Brosur dan Leaflet di bagi ke sekolah-sekolah dan Puskesmas di setiap kecamatan .
3. Melaksanakan sosialisasi materi kependudukan melalu jalur Formal dan Informal di setiap Kecamatan / Sekolah.
4. Memberikan wawasan. sikap. pengetahuan dan keterampilan



**Keterangan :** Foto Kegiatan Ajang Kreatif Genre (Generasi Berencana), Program Genre merupakan program BKKBN pusat yang mengedukasi pemuda untuk menghindari terjadinya pernikahan dini, dari anak muda sudah merencanakan, tidak hanya kelahiran, tapi mulai dari merencanakan pendidikan, kesempatan bekerja, baru merencanakan keluarga.



**Keterangan** : Foto Kegiatan Sosialisasi Sekolah Siaga kependudukan(SSK) pada tanggal 27 Juni 2020 dihadiri Bupati, kepala Dinas, Kabid, Kasi Sekretaris dan seluruh kader PKBD dan Sub PKBD Se-kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya disampaikan Sambutan Bupati Tanah Laut, Sekolah Siaga Kependudukan adalah sekolah yang menintegrasikan pendidikan kependudukan dan KB (Keluarga berencana) ke dalam mata pelajaran, sebagai pengayaan materi pembelajaran, selain itu, didalam sekolah tersebut ada pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar bagi para peserta didik dalam membentuk generasi keluarga berencana, serta dapat memahami isu kependudukan.

**b. Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :**

1. Belum optimalnya melaksanakan sosialisasi materi kependudukan melalui jalur Formal dan Informal di setiap Kecamatan / Sekolah.
2. Masih rendahnya memberikan wawasan, sikap, pengetahuan dan keterampilan tentang program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) kepada peserta didik.

**c. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :**

1. Peningkatan sosialisasi secara berkesinambungan kepada peserta didik tentang materi kependudukan melalui jalur Formal dan Informal di setiap Kecamatan / Sekolah.
2. Peningkatan penyuluhan memberikan wawasan, sikap, pengetahuan dan keterampilan tentang program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) kepada peserta didik secara tatap muka melalui Ajang kreatif Gen-Re (Generasi Berencana).

2. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS 15-49 Tahun ( Esselon II )

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian Kinerja	Catatan
2	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS 15-49 tahun	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	%	2,30	2,81	122,17	Udk :Jumlah perempuan lahir/jumlah total Perempuan (15-49 thn) Kab. Tala x5

$$TFR = 5 \sum_i^7 = 1 \text{ ASFR } i$$

➔

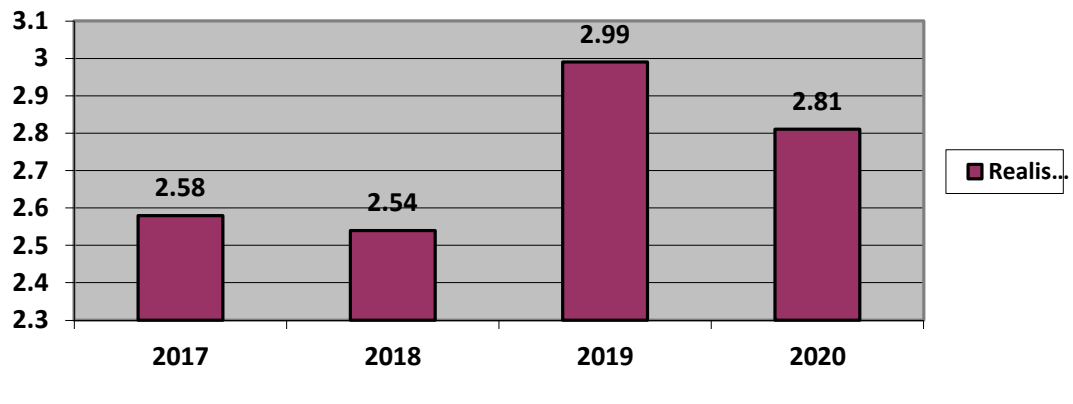
5 x 0,45 ( Data didapat berdasar hasil susenas Tahun 2010

Angka Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur, kegunaan dari Angka Total Fertility Rate (TFR) yaitu merupakan gambaran mengenai rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan dari usia 15 sampai 49 tahun, Target Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Tanah pada tahun 2020 sebesar **2,30% terealisasi sebesar 2,81 % artinya** jumlah penduduk yang lahir dan meninggal tidak sama/seimbang, jadi angka kelahiran di Kabupaten Tanah Laut selalu naik setiap tahun di banding target akhir akhir Renstra (dapat dilihat table di bawah ini).

Tabel : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TARGET RENSTRA 2023
2.	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS 15-49 tahun	<b>2,58</b> (1.189/16 2.848)x5	<b>2,54</b> (842/16 5.176) x 5	<b>2,99</b> (2.227/ 167.571) x 5	<b>2,81</b> (6.510/ 11.545) x 5	2,22

Ket. bila jumlah kelahiran kecil = kalikan 5. Bila jumlah kelahiran tinggi x5x0,45



Kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian sasaran antara lain :

**a. Faktor pendukung/Rencana Aksi dalam mencapai sasaran yaitu**

:

1. Pelayanan KB gratis secara keliling dengan menggunakan fasilitas mobil pelayanan KB, selain pelayanan menetap yang dilaksanakan di tiap-tiap Puskesmas di Kecamatan-Kecamatan.
2. Adanya peran Tenaga PLKB dan PKB serta PPKBD di tiap desa.
3. Memberikan informasi secara berkesinambungan untuk menjadi peserta KB.
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana serta jaminan ketersediaan Alat dan obat Kontrasepsi yang memadai (Mobil Alokon).



**Keterangan :** Foto Mobil Box Distribusi Alokon untuk mengantar Alat dan obat kontrasepsi ke klinik tingkat desa.



**Keterangan :** Foto Pelayanan KB Gratis Pemasangan Alat Kontrasepsi jenis Implant dan MOW. Pemasangan alat kontrasepsi modern jenis implat dan MOW dilakukan oleh Petugas/Bidan pada tanggal 03 September 2020



**Keterangan :** Foto Kegiatan Penyuluhan Kepada PUS yang punya Balita. Pertemuan dengan PUS yang baru lahir dan punya Balita di Kecamatan Panyipatan tanggal 14 Agustus 2020. Penyuluhan dilaksanakan oleh Kabid KB/KS tentang 8 fungsi Keluarga yang terdiri dari 1.Fungsi Agama, 2.Fungsi Sos-Bud,3.Fungsi Cinta kasih sayang, 4.Fungsi Perlindungan,5.Fungsi Reproduksi, 6.Fungsi Sosialisasi & Pendidikan, 7.Fungsi Ekonomi. 8.Fungsi Lingkungan fihadiri oleh Camat Panyipatan ,penyuluh dan para kader-kader KB.



**Keterangan :** Foto Kegiatan : Sosialisasi Pengelolaan Kampung KB di Aula Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut.



**Keterangan :** Foto Kegiatan : Rapat lintas sektoral persiapan pelayanan KB serentak sejuta akseptor di Aula Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut.

**b. Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :**

1. Peserta PUS yang ber KB masih belum banyak memakai alat kontrasepsi jangka panjang (IUD dan Implant) serta kontrasepsi mantab (MOW dan MOP).
2. Kurangnya tenaga penyuluh / PLKB dimana seharusnya 1 PLKB menangani 1 desa, akan tetapi kondisi saat ini 1 PLKB menangani 3 sampai 4 desa.
3. Peserta PUS yang Tidak ingin Anak Lagi (TIAL) tetapi tidak memakai Alat kontrasepsi/ tidak ber-KB.
4. Peserta PUS yang Ingin Anak ditunda (IAT) tetapi tidak memakai Alat kontrasepsi/ tidak ber-KB.

**c. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :**

1. Penambahan formasi PLKB.
2. Peningkatan penyuluhan secara berkesinambungan kepada PUS melalui komunikasi, informasi, dan edukasi secara tatap muka serta pelayanan KB gratis dengan pola jemput bola langsung kepada sasaran.
3. Siaran program Kb melalui media elektronik, media cetak (siaran Radio, brosur, Leafleat dan Spanduk).

### 3. Meningkatnya Kesetaraan Gender( **Esse;on II** )

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian Kinerja	Catatan
3	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Persentase Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	68,42	70,67	103,28	
1/3 (Ipar + IDM + linc-dist) <b>Keterangan :</b> Ipar = Indeks Keterwakilan diparlemen IDM = Indeks Pengambilan Keputusan Linc-dis = Indeks distribusi Pendapatan							

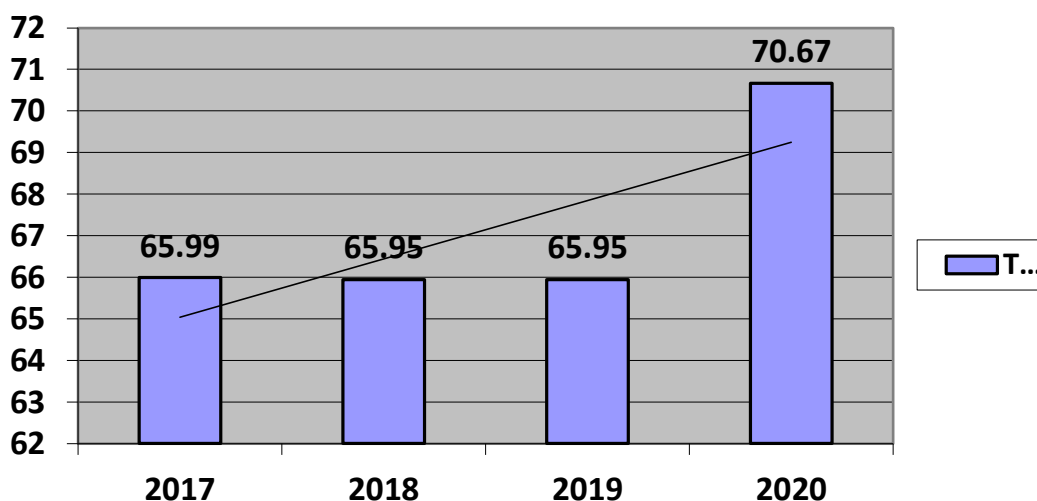
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indicator untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik dan sebagai tolak ukur keberhasilan program pengarusutamaan gender yang dilaksanakan oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut Target IDG pada tahun 2020 sebesar 68,42% terealisasi sebesar 70,67% dengan capaian kinerja 103,28

Dalam mencapai sasaran Strategis Dinas P2KBP3A memiliki 2 (dua) program dan 3 ( tiga) kegiatan yaitu program : **Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Dan Anak, Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	65,99	65,95	70,67	70,67

Sumber : BPS Tahun 2020



Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dapat menunjukkan peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, IDG terdiri dari 3 (tiga) Indikator komposit yaitu :

1. Keterlibatan perempuan di parlemen tahun 2020 sebesar = 22,86%
2. Perempuan sebagai tenaga profesional tahun 2020 sebesar= 52,80%.
3. Sumbangan pendapatan perempuan. Tahun 2020 sebesar = 28,02%

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Keterlibatan perempuan di parlemen	17,14%	17,14%	22,86%	22,86%
2	Perempuan sebagai tenaga profesional	47,47%	45,44%	52,80%	52,80%
3	Sumbangan	28,00%	27,99%	28,02%	28,02%

	pendapatan perempuan				
--	----------------------	--	--	--	--

Kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian sasaran antara lain :

**Faktor pendukung/Rencana Aksi dalam mencapai sasaran yaitu :**

1. Penyempurnaan proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan kebijakan agar selalu mendapat masukan dari perspektif gender.
2. Pelaksanaan review dan harmonisasi seluruh peraturan daerah agar berspektif gender.
3. Peningkatan kapasitas SDM untuk dapat memfasilitasi pemerintah daerah dalam menerapkan PUG.
4. Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia usaha dalam penerapan PUG.
5. Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender dan organisasi masyarakat.
6. Penguatan system penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah.
7. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG.



**Keterangan :** Foto kegiatan Pembinaan P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Keluarga Sehat Sejahtera)



**Keterangan :** Foto kegiatan Pelatihan Sasirangan tanggal 01 Mei 2020 di Kecamatan Jorong.



**Keterangan :** Foto kegiatan Pembinaan GSI /KSI (Gerakan Sayang Ibu / Kasih sayang Ibu) tanggal 10 Mei 2020 di Desa Bajuin Kecamatan Pelaihari.

**b Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :**

1. Masih rendahnya keterlibatan lintas sektoral dalam pengarusutamaan gender (PUG).

2. Kelembagaan PUG belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
3. Masih kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai pentingnya pengintegrasian persepektif gender disemua bidang dan tahan pembangunan.

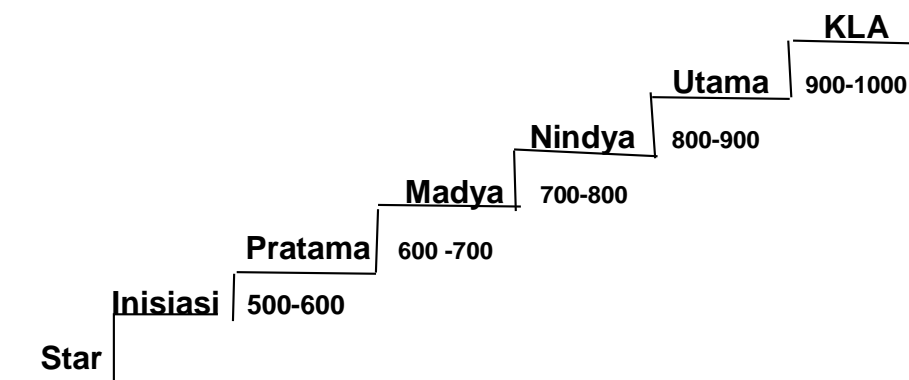
**b. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :**

1. Melakukan sosialisasi keterlibatan lintas sektoral dalam pengarustamaan gender (PUG).
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
3. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai pentingnya pengintegrasian persepektif gender disemua bidang dan tahan pembangunan.

4. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak( **Esselon II** )

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian Kinerja	Catatan
4	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Skor Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Skor	700 (Madya)	551 (Pratama)	78,71	

➔ **Kriteria Penghargaan Kabupaten Layak Anak dari Kementerian**





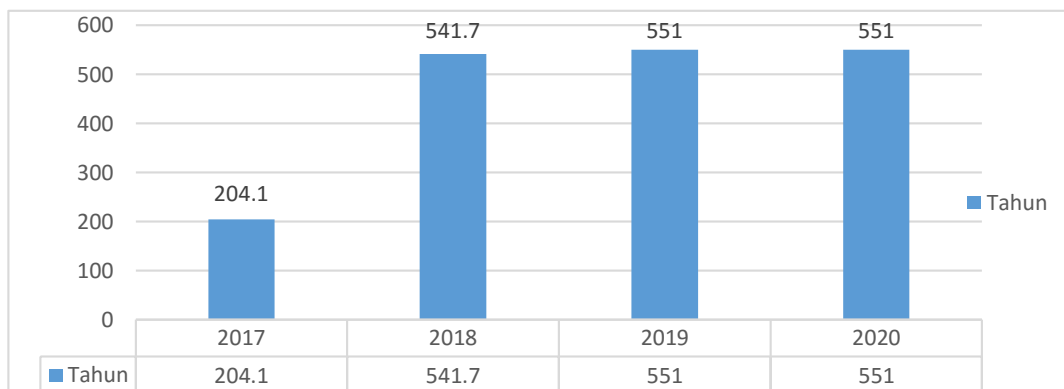
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.11 Tahun 2011 tentang kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wali kota dan perangkat daerah sebagai Unsur penyelenggara pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan daerah nomor 13 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan Anak.

Pada tahun 2020 ini sudah mendapatkan hasil penilaian dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia dengan kriteria predikat **Pratama** (551) dari target **Madya (700)** karena ada instrument indicator yang tidak terealisasi.

Untuk Pencapaian pada indikator kinerja utama tersebut melalui Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (***Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak***) dan (***Seksi Pemenuhan Hak Anak***) Kegiatan : Peningkatan kapasitas dan Jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan Anak.

Tabel : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TARGET RENSTRA 2023
4.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	204,1	541,70 (Pratama)	551 (Pratama)	551 (Pratama)	700 (Madya)



Kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian sasaran antara lain :

**a. Faktor pendukung/Rencana Aksi dalam mencapai sasaran yaitu**

:

1. Melaksanakan Koordinasi dan Sosialisasi penggarapan Gugus Tugas KLA di Kecamatan/Desa kerjasama dengan Camat, Kepala Desa dan unsur muspika.
2. Mencetak Leaflet, Brosur, Spanduk tentang penting KLA.
3. Siaran lewat media elektronik, siaran radio tentang KLA.
4. Pembuatah Baliho.
5. Melaksanaka Koordinasi dan Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 11 kecamatan.



**Keterangan :** Foto Kegiatan Rapat Persiapan Evaluasi Kabupaten Kota Layak Anak (KLA) dihadiri oleh Bupati Tabah Laut ,kepala Bapeda dan Unsur Muspika.

**Keterangan :** Foto Kegiatan Rapat koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan Gugus Tugas Kecamatan / Desa Layak Anak dan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di kecamatan Bati-Bati tanggal 7 Oktober 2020 dihadiri Kepala Dinas P2KBP3A Kab.Tala , Kabid PP/PA , Camat Bati-Bati seluruh unsur Muspika Kecamatan Bati-Bati.



**Keterangan :** Foto Kegiatan Sosialisasi Penguatan Kota Layak Anak di Kecamatan Tambang Ulang

**b Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :**

1. Belum semua sekolah dan puskesmas di Kabupaten Tanah Laut didesain Ramah terhadap Anak.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) selalu berganti dikarenakan promosi dan mutasi jabatan, sedangkan SDM tersebut sebagai penggerak program khususnya Gugus Tugas Kota Layak Anak baik di Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
3. Belum maksimal peran di luar pemerintah seperti : Dunia Usaha, Lembaga masyarakat dan media.

**b. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :**

1. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan menciptakan inovasi baru dan terobosan seperti bekerjasama dengan lembaga Pendidikan Ramah Anak menggandeng Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di setiap Sekolah.
2. Mengoptimalkan peran satuan tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPPA) di lingkungan masyarakat.

### **3. Esselon III ( Sekretaris ) A**

Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran( **Esselon III** )

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian Kinerja	Catatan
1	Meningkatnya Tata Kelola Admnistrasi Perkantoran	Persentase Tata Kelola Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	

**a. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target**

Rata-rata capaian kinerja bidang Sekretariat tahun 2020 terealisasi 100%.

**b. Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait :**

Perbandingan Persentase tata kelola administrasi perkantoran bisa dilaksanakan 100%.

**c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja :**

Persentase tata kelola administrasi perkantoran tahun 2020 dilaksanakan 100% dari target 100%.

**d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja**

Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran

**e. Analisis Realisasi Anggaran Program**

Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Sekretariat hampir terlaksana secara keseluruhan pada 4 ( empat ) Program dan 10 kegiatan dengan dana sebesar Rp.814.985.554,- terealisasi sebesar Rp.762.749.624,- dengan prosentase capaian 93,59%.

**f. Kasubag. Umum dan Kepegawaian dan Kasubag. Perencanaan dan Keuangan**

Tabel dibawah ini memperlihatkan target realisasi indikator kinerja Kasubag. Umum dan Kepegawaian dan Kasubag. Perencanaan dan Keuangan tahun 2020.

.NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
<b>1) Esselon IV Kasubag. Umum dan Kepegawaian A.1</b>					
1	Melakukan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah layanan administrasi perkantoran sesuai SOP	100%	100%	100%
2	Melakukan pemenuhan sarana prasarana kantor	Jumlah sarana prasarana kantor yang dipenuhi sesuai aturan	100%	100%	100%

3	Melakukan pemeliharaan sarana prasarana kantor	Jumlah sarana prasarana kantor yang terpelihara dan dimanfaatkan	100%	100%	100%
<b>1) Esselon IV Kasubag. Perencanaan dan Keuangan A.2</b>					
1	Melakukan penyusunan laporan perencanaan dan keuangan	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang disusun tepat waktu	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
2	Menyusun laporan kinerja	Jumlah dokumen laporan kinerja	5 Dokumen	5 Dokumen	
<b>RATA – RATA CAPAIAN</b>					<b>100</b>

### 1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target

Rata-rata capaian Kinerja Sekretariat telah terealisasi 100% dari 5 indikator kinerja, Indikator Jumlah layanan administrasi perkantoran sesuai SOP telah tercapaia 100% dari target 100%, indikator Jumlah sarana prasarana kantor yang dipenuhi sesuai aturan terealisasi 100% dari target 100%, indikator Jumlah sarana prasarana kantor yang terpelihara dan dimanfaatkan terealisasi 100% dari target 100%, indikator Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang disusun tepat waktu terealisasi 100% dari target 5 dukomen, indikator Jumlah dokumen laporan kinerja terealisasi 100% dari target 5 dukomen.

### 2. Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait :

Perbandingan target tahun 2020 dengan tahun 2019 yang terdiri dari indikator Jumlah layanan administrasi perkantoran sesuai SOP, Jumlah sarana prasarana kantor yang dipenuhi sesuai aturan, Jumlah sarana prasarana kantor yang terpelihara dan dimanfaatkan, Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang disusun tepat waktu, Jumlah dokumen laporan kinerja semuanya terealisasi 100%.

### **3. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja :**

- Jumlah layanan administrasi perkantoran sesuai SOP yang dilaksanakan oleh sekretariat Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut di tahun 2020 telah tercapai 100% dari target yang ada. Prosentase capaian dihitung Jumlah layanan administrasi perkantoran sesuai SOP dibagi Total layanan administrasi perkantoran sesuai SOP di kali 100%.
- Jumlah sarana prasarana kantor yang dipenuhi sesuai aturan yang dilaksanakan oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut di tahun 2020 telah tercapai 100% dari target yang ada.
- Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang disusun tepat waktu. Terealisasi sebanyak 6 dokumen dengan target 6 dokumen, telah terealisasi 100%, Dokumen tersebut yaitu Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah (LPPD), Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020, Dokumen Rencana Kerja Tahunan, ( Renja/RKT) Tahun 2020, Dokumen Rencana Kerja Anggaran ( RKA) sebagai dasar pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA) Tahun 2020, Tersedianya dokumen perencanaan dinas P2KBP3A sebagai bagian administrasi yang penting dalam pelaksanaan kegiatan
- Jumlah dokumen laporan kinerja Terealisasi sebanyak 5 dokumen dengan target 5 dokumen, telah terealisasi 100%, Dokumen tersebut yaitu Dokumen Catatan Laporan Atas Keuangan ( CALK) Tahun 2020, Dokumen Laporan Kinerja yang di buat setiap Triwulan I, II,III dan IV hasil rekap capaian kinerja SKPD pada tahun berkenaan.

### **4. Faktor pendukung dalam mencapai sasaran yaitu**

- Dukungan sumber daya manusia yang potensial

- Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk teknis pada pelayanan yang ada
- Dukungan sarana prasarana kerja yang memadai
- Adanya dukungan dari masyarakat penerima pelayanan untuk mengikuti prosedur pelayanan sesuai yang dipersyaratkan

**5. Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu**

- Keterbatasan petugas yang memberikan pelayanan
- Keinginan dan harapan dari masyarakat agar pelayanan dapat diterima dengan cepat sementara pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku

**6. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu**

- Memaksimalkan pelayanan dengan memanfaatkan dukungan tenaga tenaga kesehatan setempat.
- Memberikan penjelasan secara baik kepada masyarakat tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pelayanan.
- Memasang keterangan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di ruang pelayanan.

## 4. Esselon III ( Sekretaris ) B

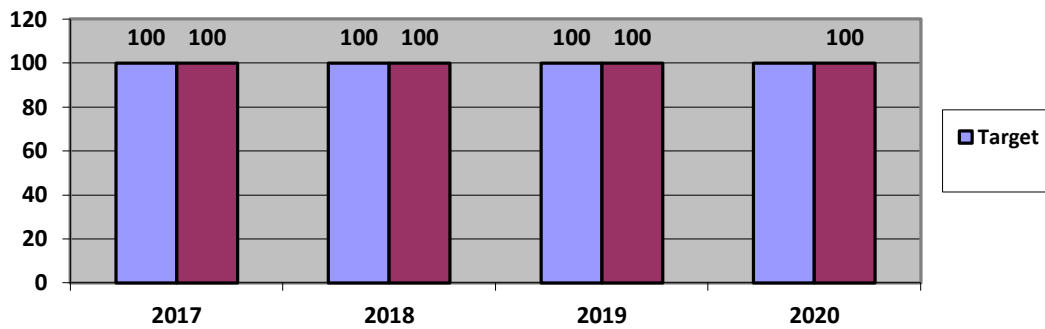
### 1) Esselon IV . Kasi Analisa Data Pelaporan dan Statistik Program B.1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian Kinerja	Catatan
1	Meningkatnya Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga	Persentase Data Mikro Keluarga di Desa/Kelurahan	%	100	100	100	
<p><u>Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia</u> x 100%                      Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga.</p>							

Tahun 2020 target penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan sebesar 100% dan terealisasi 100% berupa satu (1) buah dokumen.

#### a. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TARGET RENSTRA 2023
1.	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap Desa/Kelurahan	100	100	100	100	100



Rata-rata capaian kinerja bidang pengendalian penduduk, data dan informasi sudah terealisasi 100%, pendataan keluarga menjadi program prioritas Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut karena dilaksanakan pada awal RPJMD 2019-2023 selain itu pendataan keluarga tahun 2020 mendapatkan dukungan dengan diterbitkannya surat keputusan Bupati Tanah Laut tentang Kampung KB Nomor 188.45/798-KUM/2017. Hasil pendataan keluarga tahun 2020 harus menjadi primadona untuk menjawab kebutuhan data dan informasi pembangunan keluarga. Kabupaten Tanah Laut sudah membentuk Rumah dataku dari 11 kecamatan sebanyak 22 dan sudah di resmikan oleh Bupati Tanah Laut sebanyak 4 desa atau 18,18%

**b. Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait :**

Perbandingan target tahun 2019 dengan tahun 2018 dan tahun 2017 dari indikator Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan tercapai 100% yang berupa sebuah dukomen.

**c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja :**

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan tercapai 100% yang di laporkan oleh PPL-KB setiap bulan kepada bidang pengendalian penduduk, data dan informasi sehingga hasil laporan data tersebut di rekap menjadi sebuah dulomen data dan informasi.

**d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja :**

1. Melakukan validasi / Verifikasi data & Informasi.
2. Melakukan Bimtek petugas pengolah data penduduk.
3. Melakukan pengentrian laporan pengendalian laporan dan pelayanan kontrasepsi.
4. Melakukan pembinaan dan monitoring pencatatan dan pelaporan.
5. Membuat dan menganalisa data program
6. Membuat laporan tahunan

**e. Analisis Realisasi Anggaran Program**

Pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengendalian penduduk, data dan informasi tahun 2020 program Pembinaan Peran serta Masyarakat dan kegiatan Monev dan Pendataan Keluarga program KB dengan pagu sebesar Rp. 23.801.700,-terrealisasi sebesar Rp.23.657.500,- dengan capaian 99%.

Tabel berikut di bawah ini menunjukkan target dan realisasi indikator kinerja Kepala Seksi Analisa Data Pelaporan dan Statistik Program tahun 2020.

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Melakukan validasi / Verifikasi data & Informasi	Jumlah data dan statistik KB, PP dan PA	12 Kali	12 Kali	100
2.	Melakukan Bimtek petugas pengolah data penduduk	Jumlah petugas data penduduk yang di Bimtek	40 Petugas PLKB/PKB	40 Petugas PLKB/PKB	100
3.	Melakukan pengentrian laporan pengendalian laporan dan pelayanan kontrasepsi	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan pelayanan kontrasepsi	11 Balai Penyuluh KB 24 Faskes	11 Balai Penyuluh KB 24 Faskes	100

4.	Melakukan pembinaan dan monitoring pencatatan dan pelaporan	Jumlah pembinaan dan Monev pencatatan dan pelaporan	11 Balai Penyuluh KB	11 Balai Penyuluh KB	100
5.	Membuat dan menganalisa data program	Jumlah data program yang di analisis dan disajikan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100
6.	Membuat laporan tahunan	Dokumen Laporan Tahunan	4 Dokumen	4 Dokumen	100
<b>RATA - RATA CAPAIAN</b>					<b>100</b>

### 1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Rata-rata capaian kinerja Seksi Analisa Data Pelaporan dan Statistik Program tahun 2020 terealisasi 100%, hal ini menunjukkan kegiatan Analisa data pelaporan dan Statistik program telah terlaksana sesuai prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

### 2. Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Perbandingan pencapaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2018 dan tahun 2018 dari indikator Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan tercapai 100% yang berupa sebuah dukomen.

### 3. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Jumlah data dan statistik KB, PP dan PA, dilakukan sebanyak 12 kali terealisasi 100 % karena data keluarga menjadi program prioritas Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut karena dilaksanakan pada awal RPJMD 2019 - 2023 selain itu pendataan.
- Jumlah petugas data penduduk yang di Bimtek, jumlah petugas yang di bimtek sebanyak 40 Petugas PLKB/PKB terealisasi 100% , dengan dilaksanakan bimtek petugas mengenal dan memahami pemutakhiran juknis pendataan

keluarga dan bertambahnya wawasan, sehingga data keluarga direkap sesuai tepat waktu.

- Jumlah dokumen laporan pengendalian dan pelayanan kontrasepsi, Melakukan pengentrian laporan pengendalian , laporan dan pelayanan kontrasepsi di 11 Balai penyuluhan KB dan 24 Faskes (Fasilitas Kesehatan), terealisasi 100% Sehingga laporan direkap menjadi sebuah dokumen.
- Jumlah pembinaan dan Monev pencatatan dan pelaporan, Melakukan pembinaan dan monitoring pencatatan dan pelaporan di 11 Balai Penyuluhan KB terealisasi 100 %, karena hasil dari pembinaan harus dilakukan Monitoring (Monev).
- Jumlah data program yang di analisis dan disajikan , Membuat dan menganalisa data program di 11 Kecamatan terealisasi 100%, data keluarga wajib di buat dan di analisa sehingga data yang diperlukan Up-to date.
- Dokumen Laporan Tahunan, Membuat laporan tahunan sebanyak 4 Dokumen terealisasi 100%, Dokumen sebagai bukti autentik yang berisi data- data pembangunan keluarga.

**4. Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :**

1. Laporan data yang diminta dari Kabupaten ke kecamatan tidak tepat waktu.
2. Sulitnya mengumpulkan data tepat waktu dan Akurat.

**5. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :**

1. Pembinaan dan melaksanakan Monev ke Kecamatan
2. Melaksanakan sosialisasi tentang data
3. Perbaikan aplikasi sistem informasi data sering terjadi gangguan

**6. Faktor pendukung/Rencana Aksi dalam mencapai sasaran yaitu :**

1. Melakukan tatap muka dengan PKB masing-masing kecamatan
2. Pembinaan ke PKB secara berkesinambungan/kontinyu
3. Sosialisasi tentang Aplikasi data
4. Membentuk/Membuat Rumah Dataku di setiap Desa



**Keterangan :** Foto Kegiatan Peresmian Rumah Dataku oleh Bapak Bupati Tanah Laut di Desa Pandan Sari Kecamatan Tambang Ulang tanggal 11 Oktober 2020. Rumah data kependudukan yang disingkat Rumah dataku adalah rumah yang difungsikan sebagai pusat data dan intervensi permasalahan kependudukan yang mencakup sistem pemanfaatan data kependudukan mulai dari mengunduh, membaca, mengidentifikasi, memverifikasi dan menentukan pilihan data kependudukan, yang bersumber dari, oleh dan untuk masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di kampung KB.

**2). Esselon IV .Kasi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi B.2**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian Kinerja	Catatan
2	Meningkatnya pemahaman Pasangan Usia Subur tentang ber KB	Persentase Pasangan Usia Subur yang ber-KB	%	90	83,60	92,88	

Jumlah Peserta KB Aktif X 100 %  
 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)



$$\frac{53.679}{64.208} \times 100 \% = 83,60$$

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Peserta KB aktif adalah pasangan usia subur yang suami/istrinya sedang memakai atau menggunakan salah satu alat/cara kontrasepsi modern pada tahun pelaksanaan pendataan keluarga/pemutakhiran data keluarga. Pada tahun 2020 didapatkan 83,60% Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ber KB aktif dengan rincian jumlah peserta KB aktif 53.679 akseptor dan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 64.208 akseptor.

**a. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target**

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TARGET RENSTRA 2023
2.	Meningkatnya pemahaman Pasangan Usia Subur tentang ber KB	78,76	80,81	83,60	77,76

Rata-rata capaian kinerja bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun 2020 tercapai sebesar 83,60%, ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk ikut KB tinggi karena dengan ikut KB maka jarak kelahiran bisa di atur sesuai program KB dengan logo : "Dua Anak Cukup".

**b. Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait :**

Perbandingan target tahun 2020 dengan tahun 2019 dan tahun 2018 dari indikator persentase Pasangan Usia Subur yang ber-KB tercapai **103,45%**.

**c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja :**

Persentase Pasangan Usia Subur yang ber-KB tercapai 83,60% dari target 90% sehingga capaian kinerja sebesar 92,88%, ini hampir mendekati target, ini menunjukkan kenaikan karena animo PUS yang ber-KB cukup sadar dan paham tentang program ikut KB.

**d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja :**

1. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi.
2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
3. Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis kesertaan ber -KB.
4. Mengumpul, mengolah dan menyajikan data keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi KB dan KR.

**e. Analisis Realisasi Anggaran Program**

Pelaksanaan program dan kegiatan bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2020 program Keluarga Berencana dan kegiatan Pembinaan Masyarakat Peduli KB dan Kesehatan Reproduksi dengan pagu sebesar Rp. 292.329.000,- terealisasi sebesar Rp.180.841.800,- dengan capaian 62%..

Tabel berikut di bawah ini menunjukkan target dan realisasi indikator kinerja Kepala Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi tahun 2020.

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan ,pengendalian dan	Jumlah alat obat kontrasepsi yang tersedia	23 Faskes ( Fasilitas Kesehatan)	23 Faskes ( Fasilitas Kesehatan)	100

	pendistribusian alat obat kontrasepsi				
2.	Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Jumlah PUS yang ber-KB	61.548 PUS	53.679 Peserta KB Aktif	83,60
3.	Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis kesertaan ber-KB	Jumlah balai KB yang dibina dan di bimbing	11 Balai KB	11 Balai KB	100
4.	Mengumpul, mengolah dan menyajikan data keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen data keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	100
5.	Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasi an kegiatan seksi KB dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Laporan	12 ( Bulan)	12 ( Bulan)	100
<b>RATA - RATA CAPAIAN</b>					96,72

### 1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Rata-rata capaian kinerja Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi tahun 2020 terealisasi dengan rata-rata capaian 96,72%, hal ini menunjukkan kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana telah terlaksana sesuai prosedur, tugas ,

fungsi dan ketentuan yang telah ditetapkan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

## 2. Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Perbandingan pencapaian kinerja tahun 2018 (83,60%) dan tahun 2019 (96,72%), hal ini menunjukkan peserta KB Aktif ada kenaikan 115,69%.

## 3. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Jumlah alat obat kontrasepsi yang tersedia sebanyak 23 Faskes (Fasilitas Kesehatan) dengan target 23 Faskes (Fasilitas Kesehatan) terealisasi 100% berarti .distribusi alat obat kontrasepsi terpenuhi sesuai kebutuhan.
- Jumlah PUS yang ber-KB dari target 61.548 PUS terealisasi 53.679 peserta KB Aktif. peserta KB aktif kebanyakan para remaja yang baru menikah usia 15 - 25 tahun sehingga capaian sebesar 83,60% pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dilaksanakan bersamaan hari Manunggal Tuntung pandang.
- Jumlah balai KB yang dibina dan di bimbing dari 11 Balai KB terealisasi 100%, pembinaan dilakukan secara rutin sebagai penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis kesertaan ber KB.
- Jumlah dokumen data keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi dari target 1 Dokumen terealisasi 100%, Mengumpul, mengolah dan menyajikan data keluarga berencana dan kesehatan reproduksi harus direkap dan menjadi sumber informasi data keluarga yang up to date/terbaru.
- Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dari target 12 ( Bulan) terealisasi 100%, Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian

kegiatan seksi KB dan Kesehatan wajib dilakukan karena sebagai bahan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan program di lapangan kepada pimpinan.

### 3). Esselon IV . Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga B.3

Tabel berikut di bawah ini menunjukkan target dan realisasi indikator kinerja Kepala Pemberdayaan Keluarga tahun 2020.

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REAISASI	CAPAIAN (%)
1.	Melaksanakan pembinaan pemberdayaan Ekonomi keluarga	Jumlah kelompok UPPKS yang dibina	44 kelompok	100	100
2.	Melaksanakan penilaian lomba UPPKS	Jumlah kelompok UPPKS yang dinilai	44 kelompok	100	100
3.	Melaksanakan pelatihan tentang UPPKS	Jumlah kelompok UPPKS yang dilatih dan administrasi menjadi baik	44 Orang kelompok	100	100
<b>RATA - RATA CAPAIAN</b>					100

#### 1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Rata-rata capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Keluarga tahun 2020 terealisasi dengan rata-rata capaian 100%, hal ini menunjukkan kegiatan pembinaan pemberdayaan Ekonomi keluarga, lomba UPPKS dan pelatihan tentang UPPKS telah terlaksana sesuai prosedur, tugas, fungsi dan ketentuan yang telah ditetapkan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

#### 2. Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Perbandingan pencapaian kinerja tahun 2019 (100%) dan tahun 2020 (100%), hal ini menunjukkan kegiatan pembinaan pemberdayaan Ekonomi keluarga, lomba UPPKS dan pelatihan tentang UPPKS telah terlaksana 100%.

### **3. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja**

- Jumlah kelompok UPPKS (44 kelompok) yang dibina di laksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- Jumlah kelompok UPPKS yang dinilai (44 kelompok) dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- Jumlah kelompok UPPKS yang dilatih dan administrasi menjadi baik (44 orang) di laksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

### **4. Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :**

- Peserta PUS yang ber KB masih belum banyak memakai alat kontrasepsi jangka panjang (IUD dan Implant) serta kontrasepsi mantab (MOW dan MOP)
- Kurangnya tenaga penyuluh yang terampil di Desa

### **5. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :**

- Penambahan formasi PLKB
- Peningkatan penyuluhan secara berkesinambungan kepada PUS melalui komunikasi, informasi, dan edukasi secara tatap muka serta pelayanan KB gratis dengan pola jemput bola langsung kepada sasaran

### **6. Faktor pendukung/Rencana Aksi dalam mencapai sasaran yaitu :**

- Pelayanan KB gratis secara keliling dengan menggunakan fasilitas mobil pelayanan KB, selain pelayanan menetap yang dilaksanakan di tiap-tiap Puskesmas di Kecamatan-Kecamatan, Tenaga PLKB dan PKB serta PPKBD di tiap desa
- Tersedianya kader PPKBD dan sub PPKBD di setiap desa

- Dukungan dana dari DAK Pusat baik Fisik maupun Non Fisik
- Orientasi pelayanan konseling KB



*Keterangan : Foto Kegiatan Pelayanan KB Gratis Pada acara Manunggal Tuntung Pandang di Desa Kampung Baru Kecamatan Pelaihari*

#### 4) Esselon IV Kepala Seksi Pengendalian Penduduk B.4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian Kinerja	Catatan
3	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Persentase PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	9	PM		

Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak dilayani **dibagi** Jumlah PUS x 100%

$$\frac{\text{IAT, TIAL}}{x 100} \text{ PUS} \rightarrow \frac{5.214}{64.208} \times 100 = 8.12$$

**a. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target**

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TARGET RENSTRA 2023
3.	Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	12,76	10,20	8,12	9

Rata-rata capaian kinerja bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera untuk tahun 2020 target Unmet Need pada dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah laut sebesar 9% terealisasi 8,12% capaian kinerja 90,22%. Unmet Need KB adalah wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan tetapi tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi. Tingginya angka unmet Need dalam permasalahan program KB berakibat rendahnya prevalensi kontrasepsi sehingga memicu tingginya angka kelahiran dan terjadi tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk. Khusus BKKBN.

**b. Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait :**

Perbandingan target tahun 2020 dari indikator Persentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) tercapai 8,12% dibanding tahun 2019 lebih rendah .semakin rendah capaian unmet Need semakin baik.

**c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja :**

Persentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) pada bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 tercapai 8,12% dari target 9 %,semakin rendah capaian unmet need semakin baik karena

bisa menekan angka kelahiran dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP).

**d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja :**

1. Melaksanakan sosialisasi program pengendalian penduduk.
2. Melaksanakan pembinaan/sosialisasi Kampung KB.
3. Melaksanakan pembinaan/sosialisasi Rumah Dataku.
4. Melaksanakan pembinaan/fasilitasi program Gen-Re (Generasi remaja).
5. Melaksanakan kerjasama Koordinasi / fasilitasi bersama koalisi kependudukan
6. Melaksanakan pembinaan/fasilitasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)
7. Melaksanakan kerja sama/fasilitasi dengan FAPSEDU (Forum Antar Ummat beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan)

**e. Analisis Realisasi Anggaran Program**

Pelaksanaan program dan kegiatan bidang KB dan KS hampir terlaksana secara keseluruhan pada dua program dan empat kegiatan.

1. Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga Sejahtera dengan pagu sebesar Rp.1.820.587.025,- terealisasi sebesar Rp.1.699.716.900,- capaian kinerja 93,36%. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dengan sebesar Rp.55.718.125,- terealisasi sebesar Rp.54.405.500,- capaian kinerja 97,64%.
2. Program Advokasi dan Pengendalian Penduduk dengan pagu sebesar Rp.176.151.332,- terealisasi Rp.158.423.650,- capaian kinerja 89,93%, Kegiatan Pengelolaan sistem Informasi Manajemen Pengendalian Penduduk ,KB, PP dan PAdengan

pagu sebesar Rp. 81.502.732,-terrealisasi sebesar Rp. 71.224.150,- capaian kinerja 87,38%.

Tabel berikut di bawah ini menunjukkan target dan realisasi indikator kinerja Kepala Seksi Pengendalian Penduduk tahun 2020.

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REAISASI	CAPAIAN (%)
1.	Melaksanakan sosialisasi program pengendalian penduduk	Jumlah mitra kerja yang mengikuti sosialisasi Pengendalian penduduk	10 Mitra Kerja	10 Mitra Kerja	100
2.	Melaksanakan pembinaan/sosialisasi Kampung KB	Jumlah Desa kampung KB yang mengikuti pembinaan/Sosialisasi	22 kampung KB	22 kampung KB	100
3.	Melaksanakan pembinaan/sosialisasi Rumah Dataku	Jumlah Rumah Dataku yang mengikuti pembinaan/Sosialisasi	22 Rumah Dataku	22 Rumah Dataku	100
4.	Melaksanakan pembinaan/fasilitasi program Generasi Remaja ( Generasi remaja )	Jumlah kelompok PIK ( Pusat Informasi Konseling)	40 Kelompok PIK	40 Kelompok PIK	100
5.	Melaksanakan kerjasama Koordinasi /fasilitasi bersama koalisi kependudukan	Jumlah kerja sama koordinasi tentang koalisi kependudukan	7 kali koordinasi	7 kali koordinasi	100
6.	Melaksanakan pembinaan/fasilitasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	Jumlah pembinaan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	5 kali	5 kali	100
7.	Melaksanakan kerja sama/fasilitasi dengan FAPSEDU( Forum Antar Ummat beragama Peduli	Jumlah kegiatan FAPSEDU	6 kali	6 kali	100

	Keluarga Sejahtera dan Kependudukan)				
<b>RATA - RATA CAPAIAN</b>					100

### **1. Perbandingan Realisasi dengan Target**

Rata-rata capaian kinerja Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dalam kegiatan sosialisasi program pengendalian penduduk terealisasi 100%, hal ini menunjukkan bahwa seluruh kinerja utama sosialisasi program pengendalian penduduk telah terlaksana dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

### **2. Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait**

Perbandingan pencapaian kinerja tahun 2019 (100%) dan tahun 2020 (100 %), hal ini menunjukkan adanya hasil keluaran yang dicapai terlaksana tepat waktu.

### **3. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja**

3.1. Jumlah mitra kerja yang mengikuti sosialisasi Program Pengendalian Penduduk dengan target 10 Mitra Kerja terealisasi 100% , mitra kerja yang mengikuti sosialisasi Program Pengendalian Penduduk antara lain :

- Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kabupaten Tanah Laut
- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut
- Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut
- Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Laut
- Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
- Bappeda Kabupaten Tanah Laut

- Inspektorat Kabupaten Tanah Laut
  - BPKAD Kabupaten Tanah Laut
  - Dinas PMPD kabupaten Tanah Laut
- 3.2. Jumlah Desa kampung KB yang mengikuti pembinaan/Sosialisasi dari target 22 kampung KB teralisasi 100 %, adapun desa kampung KB yang mengikuti Sosialisasi adalah Desa Swarangan, Desa Bajuin, Desa Martadah, Desa Benua Raya, Desa Swarangan, Desa Jorong, Desa Asam-Asam, Desa Martadah, Desa Panggung, Desa Mekar Sari, Desa Kintap Kecil, Desa Kurau, Desa Labuan Emas, Desa Panyipatan, Desa Sungai Riam, Desa Martadah, Desa Ujung bati-Bati, Desa Kebun Raya Kintap, Desa Muara Asa-Asam, Desa Tanjung Pelaihari, Desa Maluka Baulin Kurau, Desa Raden Kurau, Desa Tambak Sarinah Kurau, Desa Srikandi Kurau.
- 3.3. Jumlah Rumah Dataku yang mengikuti pembinaan/Sosialisasi dari target 22 Rumah Dataku terealisasi 100% dari 22 Rumah dataku yang diresmikan oleh Bapak Bupati Tanah Laut baru 5 Desa
- 3.4. Jumlah kelompok PIK (Pusat Informasi Konseling) dari target 40 klmpk PIK terealisasi 100%. sasaran pembinaan/fasilitasi kepada Gen-Re (Generasi remaja) anak-anak usia sekolah
- 3.5. Jumlah pembinaan Sekolah Siaga (SSK) dari target 5 kali terealisasi 100%
- 3.6. Jumlah kegiatan FAPSEDU (Forum Antar Ummat beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan) dari target 6 kali terealisasi 100%

## **5) Esselon IV Kepala Seksi Ketahanan Keluarga B.5**

Tabel berikut di bawah ini menunjukkan target dan realisasi indikator kinerja Kepala Seksi Ketahanan Keluarga tahun 2020.

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REAISASI	CAPAIAN (%)
1.	Melaksanakan pembinaan kelompok BKB, BKR dan BKL	Jumlah pembinaan kelompok BKB, BKR dan BKL	50 kelompok	50 kelompok	100
2.	Melakukan fasilitasi lomba BKB	Jumlah kelompok BKB yang mengikuti lomba	70 BKB	70 BKB	100
3.	Melaksanakan lomba keluarga harmonis	Jumlah keluarga harmonis yang mengikuti lomba	5 keluarga harmonis	3 keluarga harmonis	60
<b>RATA - RATA CAPAIAN</b>					86,67

### 1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Rata-rata capaian kinerja Kepala Kepala Seksi Ketahanan Keluarga dalam kegiatan pembinaan petugas pengelola program KB terealisasi 86,67% ,hal menunjukkan bahwa seluruh kinerja utama kegiatan sudah terlaksana sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

### 2. Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Perbandingan pencapaian kinerja tahun 2019 ( 75% ) dan tahun 2020 ( 86,67%), hal ini menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja 115,56%.

### 3. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

1. Jumlah pembinaan kelompok BKB, BKR dan BKL dari target 50 kelompok terealisasi 100%, pembinaan kelompok saasarannya pada kelompok Bina Keluarga Balita , kelompok Bina Keluarga Rema dan kelompok Bina keluarga Lansia.
2. Jumlah kelompok BKB yang mengikuti lomba dari target 70 kelompok terealisasi 100% , lomba Bina Keluarga Balita dilaksanakan bersamaan hari Keluarga Nasional.
3. Jumlah keluarga harmonis yang mengikuti lomba dari target 5 keluarga harmonis terealisasi 3 keluarga harmonis capaian kinerja 60%,pelaksanaan lomba keluarga harmonis

bersamaam dengan hari keluarga nasional yang setiap tahun di laksanakan.

## 6) Esselon IV. Kepala Seksi Advokasi, Penggerakan dan Informasi

### B.6

Tabel berikut di bawah ini menunjukkan target dan realisasi indikator kinerja Kepala Seksi Advokasi, Penggerakan dan Informasi tahun 2020.

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REAISASI	CAPAIAN (%)
1.	Melakukan penyediaan media informasi KB	Jumlah informasi KB yang dapat di Upload dan di akses	6 Media	6 Media	100
2.	Melakukan Monev kegiatan Advokasi, penggerakan dan informasi di Balai Penyuluhan	Jumlah monev kegiatan Advokasi, penggerakan dan informasi di Balai Penyuluhan	6 Kali Monev	6 Kali Monev	100
3.	Melaksanakan kegiatan Advokasi, Pergerakan dan informasi di Balai Penyuluhan KB	Jumlah kegiatan Advokasi, Pergerakan dan informasi di Balai Penyuluhan KB	11 Balai Penyuluhan KB	11 Balai Penyuluhan KB	100
4.	Melakukan pembinaan kepada Tim Website Kabupaten	Jumlah pembinaan kepada Tim Website Kabupaten	12 kali	12 kali	100
5.	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.	Jumlah koordinasi dengan instansi terkait	8 kali	8 kali	100
<b>RATA - RATA CAPAIAN</b>					100

#### 1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Rata-rata capaian kinerja Advokasi, Penggerakan dan Informasi terealisasi 100% , hal ini menunjukkan bahwa seluruh kinerja utama kegiatan Advokasi Pelayanan KIE telah terlaksana dengan hasil yang sesuai target.

**2. Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait**

Perbandingan pencapaian kinerja tahun 2019 100% dan tahun 2020 100% , hal ini menunjukkan adanya hasil keluaran yang dicapai memenuhi target..

**3. Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu**

- Kurangnya dukungan dari suami, informasi dan budaya yang masih dipegang teguh oleh PUS
- Belum optimalnya peningkatan kualitas dan cakupan informasi, pelayanan serta penguatan keterlibatan Tokoh Masyarakat (TOMA,dan Tokoh Agama (TOGA)
- Masih rendahnya kualitas pelayanan dan cakupan informasi, pelayanan serta penguatan keterlibatan Tokoh Masyarakat (TOMA,dan Tokoh Agama (TOGA)

**4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu**

- Meningkatkan cakupan akseptor KB dengan melibatkan suami dan keluarga
- Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat, TNI Manunggal KB dan TMKK (TNI Manunggal KB Kesehatan)
- Peningkatan kualitas dan cakupan informasi, pelayanan serta penguatan keterlibatan Tokoh Masyarakat (TOMA,dan Tokoh Agama (TOGA)

**5. Faktor pendukung/Rencana Aksi dalam mencapai sasaran yaitu**

1. Meningkatkan pergerakan lini di lapangan dengan memberdayakan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
2. Menyiapkan bahan-bahan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukatif) yang bersifat Edukatif bagi keluarga dalam merencanakan keluarganya

3. Melaksanakan konseling KB untuk merubah sikap dan perilaku masyarakat sehingga apa yang menjadi pilihan masyarakat dalam ber-KB benar-benar mantap dan lestari



ada acara Manunggal  
kelainari

7) mpunan dan Anak

#### B.7

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian Kinerja	Catatan
4	Meningkatnya penyelesaian pengaduan tindakkekerasan perempuan dan Anak	~ Prosentase perempuan korban kekerasan	%	100	100 (25 kasus)	100	Kasus terselesaikan 19 kasus
		~Prosentase anak korban kekerasan	%	100	100 (6 kasus)	100	Kasus terselesaikan 15 kasus

Dalam melaksanakan perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan instansi terkait melakukan pelayanan terpadu dalam suatu wadah yang bernama P2TP2A.

P2TP2A yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, meliputi : pelayanan informasi, konsultasi psikologis dan hukum, pendampingan dan advokasi, pelayanan medis dengan rujukan secara gratis. Tujuannya yaitu melakukan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan berupaya memberikan

kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

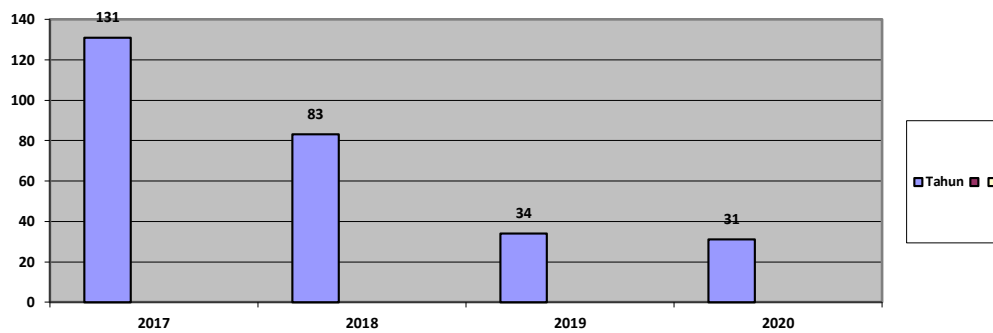
Pada tahun 2020 ini terdapat 31 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana tabel berikut :

NO	JENIS KEKERASAN	P2TP2A		
		Perempuan	Laki - Laki	Jumlah
1	Fisik	10	-	10
2	Psikis	10	-	10
3	Seksual	6	-	6
4	Penelantaran	-	-	-
5	Perdagangan Orang	-	-	-
6	Eksplorasi	-	-	-
7	Lainnya	5	-	5
<b>Jumlah Kasus</b>		<b>31</b>		<b>31</b>

Dari data yang tampak pada tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2020 kasus adalah psikis sebanyak 10 kasus, kasus kekerasan fisik dan 10 kasus, kekerasan seksual padaperempuan dan anak 6 kasus, penelantaran anak 5 orang. Dengan jumlah korban anak 31 orang seksual) dan perempuan 2 orang.

**a. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target**

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TARGET RENSTR A 2023
4.	~ Prosentase perempuan korban kekerasan	100 (30 kasus)	100 (12 kasus)	100 (19 kasus)	100 (18 kasus)	100
	~Prosentase anak korban Kekerasan	100 (101 kasus)	100 (71 kasus)	100 (15 kasus)	100 ( 13 Kasus)	



Rata-rata capaian kinerja bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak tahun 2020 dari pengaduan kekerasan 31 kasus bisa terselesaikan 100%

**b. Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait :**

Perbandingan pengaduan kasus kekerasan tahun 2020 ( 31 ) kasus dengan tahun 2019 ( 34 ) kasus terjadi penurunan dan bisa terselesaikan 100%.

**c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja :**

1. Prosentase perempuan korban kekerasan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 terselesaikan 100% dari jumlah yang mengadu sebanyak 25 kasus.
2. Prosentase anak korban kekerasan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 terselesaikan 100% dari jumlah yang mengadu sebanyak 6 kasus.

**d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja :**

1. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian kasus kekerasan perempuan dan Anak.
2. Melaksanakan fasilitasi korban kasus yang berhubungan dengan hukum.
3. Melaksanakan fasilitasi visum korban ke Rumah Sakit.

**e. Analisis Realisasi Anggaran Program**

Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak hampir terlaksana secara keseluruhan pada satu Program dan satu kegiatan yaitu Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak sebesar Rp.94.199.720,- terealisasi sebesar Rp.40.741.820,- dengan prosentase capaian 43,10%.

Tabel berikut dibawah ini memperlihatkan target realisasi indikator kinerja Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak tahun 2020.

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Melaksanakan fasilitasi penyelesaian kasus kekerasan perempuan dan Anak	Jumlah penyelesaian kasus kekerasan perempuan dan Anak	12 Kasus	31 Kasus	100
2.	Melaksanakan fasilitasi korban kasus yang berhubungan dengan hukum	Jumlah korban kasus yang berhubungan dengan hukum	12 kasus	31 kasus	100
3.	Melaksanakan fasilitasi visum korban ke Rumah Sakit	Jumlah korban yang di visum ke Rumah Sakit	12 Kasus	31 Kasus	100
<b>RATA - RATA CAPAIAN</b>					100

**1. Perbandingan Realisasi dengan Target**

Rata- rata capaian kinerja Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak terealisasi 100, hal ini menunjukkan pengaduan kasus kekerasan pada perempuan dan Anak di Kabupaten Tanah Laut diselesaikan dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

## 2. Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Perbandingan Pencapaian kinerja tahun 2019 (100%) dan Tahun 2020 (100%) , hal ini menunjukkan pengaduan dan penyelesaian kasus kekerasan pada perempuan dan anak diselesaikan dengan prosedur dan ketetapan yang telah ditentukan.

## 3. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Jumlah penyelesaian kasus kekerasan perempuan dan Anak di Kabupaten Tanah Laut dari pengaduan sebanyak 31 kasus terselesaikan dengan baik dan sesuai prosedur.
- Jumlah korban kasus yang berhubungan dengan hukum dilakukan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk ditindak lanjutnya sebagai mana hukum yang berlaku
- Jumlah korban yang di visum ke Rumah Sakit bekerjasama sama dengan Dinas instansi terkait ( Psikologi ) untuk merawat kasus tersebut.

## 8) Esselon IV Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan B.8

Tabel dibawah ini memperlihatkan target realisasi indikator kinerja KepalaSeksi Pemberdayaan Perempuan tahun 2020.

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Melakukan pembinaan pemberdayaan perempuan	Jumlah kelompok home industri perempuan yang dibina	38 klmpk	38 klmpk	100
2	Melakukan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	29 Organisasi	29 Organisasi	100

3	Melaksanakan kegiatan hari-hari besar	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	5 kali	5 kali	100
4	Melakukan koordinasi dengan organisasi perempuan	Jumlah Organisasi	15 organisasi	15 organisasi	100
<b>RATA- RATA CAPAIAN</b>					<b>100</b>

### 1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Rata- rata capaian kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan terealisasi 100, hal ini menunjukkan pembinaan pemberdayaan perempuan , pembinaan organisasi perempuan dan koordinasi dengan organisasi perempuan di Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

### 2. Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait :

Perbandingan pembinaan pemberdayaan perempuan, pembinaan organisasi perempuan dan koordinasi dengan organisasi perempuan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 dengan tahun 2019 bisa dilaksanakan 100%.

### 3. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja :

- Jumlah kelompok home industri perempuan yang dibina Jumlah peserta Jambore FAD yang terfasilitasi Jumlah organisasi perempuan yang dibina di laksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- Jumlah Organisasi yang dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

**9) Esselon IV Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak B.9**

Tabel dibawah ini memperlihatkan target realisasi indikator kinerja KepalaSeksi Pemenuhan Hak Anak tahun 2020.

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Melaksanakan fasilitasi Jambore Forum Anak Daerah	Jumlah peserta Jambore FAD yang terfasilitasi.	2.500 peserta	2.500 peserta	100
2	Melakukan sosialisasi Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	Jumlah lembaga PUG dan Anak yang mengikuti Sosialisasi	3 kali Sosialisasi	3 kali Sosialisasi	100
3	Melakukan Bimtek Petugas KLA	Jumlah petugas KLA yang bersertifikat	25 Orang	25 Orang	100
4	Melaksana kegiatan rapat koordinasi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100
5	Melaksanakan Monev tentang keterlibatan Forum Anak Daerah	Jumlah Monev tentang keterlibatan Forum Anak Daerah	3 Kali	3 Kali	100
<b>RATA- RATA CAPAIAN</b>					<b>100</b>

**1. Perbandingan Realisasi dengan Target.**

Rata- rata capaian kinerja Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak terealisasi 100, hal ini menunjukkan fasilitasi Jambore Forum Anak Daerah, sosialisasi Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak, Bimtek Petugas KLA, Monev tentang keterlibatan Forum Anak Daerah di Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

**2. Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait :**

Perbandingan fasilitasi Jambore Forum Anak Daerah, sosialisasi Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak, Bimtek Petugas

KLA, Monev tentang keterlibatan Forum Anak Daerah di Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 dengan tahun 2019 bisa dilaksanakan 100%.

**3. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja :**

- Jumlah peserta Jambore FAD yang terfasilitasi di laksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Dukumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA).
- Jumlah lembaga PUG dan Anak yang mengikuti Sosialisasi di laksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Dukumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA).
- Jumlah petugas KLA yang bersertifikat di laksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Dukumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA).
- Jumlah kegiatan rapat koordinasi di laksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- Jumlah Monev tentang keterlibatan Forum Anak Daerah di laksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

**4. Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :**

- Lemahnya penguatan fungsi keluarga, peran sekolah, pendekatan lembaga masyarakat hingga dunia usaha.
- Banyaknya materi-materi bermuatan pornografi yang membawa dampak buruk bagi masyarakat terutama generasi muda sehingga berpotensi terjadinya kekerasan seksual dan dekadensi moral di masyarakat.
- Rendahnya pendekatan dan pemahaman dari tokoh masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang.

- Kurangnya komitmen dan pemahaman dari SOPD/Lintas sektoral tentang hak-hak anak ataupun Konvensi Hak Anak (KHA) serta pembentukan forum anak di tingkat Kabupaten.

**5. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :**

- Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak, KDRT, TPPO dan Pornografi secara rutin
- Memberikan advokasi kepada pengelola PPT di Kabupaten/Kota
- Melakukan sosialisasi fungsi keluarga, peran sekolah , pendekatan lembaga masyarakat hingga dunia usaha
- Melakukan koordinasi secara intens terhadap instansi lintas sektor melalui implementasi program yang telah dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah yang ada dalam Gugus Tugas Trafficking dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA).
- Bersama-sama dengan Swadaya Masyarakat melakukan sosialisasi kepada lingkungan sekolah baik di tingkat SMU dan SLTP dan juga melakukan advokasi/pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

**6. Faktor pendukung/Rencana Aksi dalam mencapai sasaran yaitu :**

- Melakukan kerjasama dari lintas sektor seperti kepolisian dan rumah sakit dalam hal visum advokasi / pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan
- Dukungan dari tenaga psikolog dalam melakukan advokasi / pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan
- Me-optimalkan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman anak-anak mengenai kekerasan yang rentan terjadi
- Melakukan Sosialisasi, pelatihan dan kampanye anti kekerasan

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

### 1) Anggaran dan Realisasi APBD 2020.

NO	Program	Uraian	Anggaran ( Rp)
<b>I</b>	<b>Program :</b>	<b>Pelayanan Adminitrasi perkantoran</b>	<b>814.985.554,-</b>
1	Kegiatan	Penyediaan jasa bahan,peralatan dan perlengkapan perkantoran	191.863.900,-
2	Kegiatan	Penyediaan rapat-rapat,konsultasi, dan koordinasi	250.622.861,-
3	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	372.498.793,-
<b>II</b>	<b>Program</b>	<b>Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Kinerja SKPD</b>	<b>20.000.000,-</b>
1	Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan	20.000.000,-
<b>III</b>	<b>Program</b>	<b>Pemenuhan,Peningkatan Sarana / Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya manusia</b>	<b>110.852.342,-</b>
1	Kegiatan	Pengadaan sarana dan prasaran perkantoran	20.150.000,-
2	Kegiatan	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	90.702.342,-
3	Kegiatan	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	0,
4	Kegiatan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0,

<b>IV</b>	<b>Program</b>	<b>Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD</b>	<b>7.010.600,-</b>
1	Kegiatan	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	3.554.100,-
2	Kegiatan	Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan kinerja	3.456.500,-
<b>V</b>	<b>Program</b>	<b>Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga Sejahtera</b>	<b>1.820.587.025,-</b>
1	Kegiatan	Pembinaan Masyarakat Peduli KB dan Kesehatan Reproduksi	0,-
2	Kegiatan	Monev Pelayanan KB dan Pengelolaan ALKON	292.329.000,-
3	Kegiatan	Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS)	1.472.539.900,-
4	Kegiatan	Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	55.718.125,-
<b>VI</b>	<b>Program</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Dan Anak</b>	<b>427.964.640,-</b>
1	Kegiatan	Pembinaan Pemberdayaan Perempuan, Organisasi Perempuan dan Kesetaraan Gender	320.158.735,-
2	Kegiatan	Pendampingan dan Penanganan Pelindungan Perempuan dan Anak	107.805.905,-
<b>VII</b>	<b>Program</b>	<b>Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak</b>	<b>94,199,720,-</b>
1	Kegiatan	Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan Anak	94,199,720,-
<b>VIII</b>	<b>Program</b>	<b>Advokasi dan Pengendalian Penduduk</b>	<b>176.151.332,-</b>

1	Kegiatan	Advokasi dan KIE Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	70,846,900,-
2	Kegiatan	Monev dan Pendataan Keluarga	23.801.700,-
3	Kegiatan	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	81.502.732,-
<b>IX</b>	<b>Program :</b>	<b>Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Lini Lapangan</b>	<b>2.922.444.220,-</b>
1	Kegiatan	Operasional bagi Balai Penyuluhan KB (Dak Non Fisik)	958.010.120,-
2	Kegiatan	Operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi ( Alokon ) - ( Dak Non Fisik )	29.065.000,-
3	Kegiatan	Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan lainnya di Kampung KB ( Dak Non Fisik )	862.528.000,-
4	Kegiatan	Operasional Pembinaan Program KKBPK bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD) ( Dak Non Fisik )	262.841.100,-
<b>X</b>	<b>Program :</b>	<b>Meningkatnya Dukungan Sarana Prasarana Pelayanan KB</b>	<b>126.500.000,-</b>
1	Kegiatan	Pengadaan sarana prasarana klinik pelayanan keluarga berencana (DAK Fisik)	126.500.000,-
<b>XI</b>	<b>Program :</b>	<b>Meningkatnya Dukungan Sarana dan prasarana Penyuluhan KB</b>	<b>469.200.000,-</b>

1	Kegiatan	Pengadaan sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan KB (DAK Fisik)	469.200.000,-
<b>TOTAL</b>			<b>6.989.895.433,-</b>

## 2) Anggaran dan realisasi Menurut Sasaran dan Program

NO	Program	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi sasaran program
<b>I</b>	<b>Program :</b>	<b>Pelayanan Adminitrasi perkantoran</b>	<b>814.985.554,-</b>	<b>762.749.624,-</b>	<b>Nilai Sakip ( skor ) BB (70,47 )</b>
1	Kegiatan	Penyediaan jasa bahan,peralatan dan perlengkapan perkantoran	191.863.900,-	163.655.049,-	
2	Kegiatan	Penyediaan rapat-rapat,konsultasi, dan koordinasi	250.622.861,-	231.601.355,-	
3	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	372.498.793,-	367.493.220,-	
<b>II</b>	<b>Program</b>	<b>Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Kinerja SKPD</b>	<b>20.000.000,-</b>	<b>0</b>	<b>Nilai Sakip (skor) BB (70,47 )</b>
1	Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan	20.000.000,-	0	
<b>III</b>	<b>Program</b>	<b>Pemenuhan,Peningkatan Sarana / Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya manusia</b>	<b>110.852.342,-</b>	<b>82.878.050,-</b>	<b>Nilai Sakip (skor) BB (70,47 )</b>

1	Kegiatan	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	20.150.000,-	20.150.000,-	
2	Kegiatan	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	90.702.342,-	62.728.050,-	
3	Kegiatan	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0,	0	
4	Kegiatan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0,	0	
<b>IV</b>	<b>Program</b>	<b>Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD</b>	<b>7.010.600,-</b>	<b>6.249.200,-</b>	<b>Nilai Sakip (skor) BB (70,47 )</b>
1	Kegiatan	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	3.554.100,-	2.69.000,-	
2	Kegiatan	Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan kinerja	3.456.500,-	3.400.200,-	
<b>V</b>	<b>Program</b>	<b>Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga Sejahtera</b>	<b>1.820.587.025,-</b>	<b>1.699.716.900,-</b>	<b>Persentase Total Fertility Rate (TFR) 2,81%</b>
1	Kegiatan	Pembinaan Masyarakat Peduli KB dan Kesehatan Reproduksi	0,-	0,-	
2	Kegiatan	Monev Pelayanan KB dan Pengelolaan ALKON	292.329.000,-	180.841.800,-	

3	Kegiatan	Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS)	1.472.539.900,-	1.464.469.600,-	
4	Kegiatan	Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	55.718.125,-	54.405.500,-	
<b>VI</b>	<b>Program</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Dan Anak</b>	<b>427.964.640,-</b>	<b>248.635.012,-</b>	<b>Peresentase penyelesaian Kasus 100%</b>
1	Kegiatan	Pembinaan Pemberdayaan Perempuan, Organisasi Perempuan dan Kesetaraan Gender	320.158.735,-	168.899.500,-	
2	Kegiatan	Pendampingan dan Penanganan Pelindungan Perempuan dan Anak	107.805.905,-	81.735.512,-	
<b>VII</b>	<b>Program</b>	<b>Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak</b>	<b>94,199,720,-</b>	<b>40.741.820,-</b>	<b>Nilai KLA Skor Pratama (551)</b>
1	Kegiatan	Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan Anak	94,199,720,-	40.741.820,-	
<b>VIII</b>	<b>Program</b>	<b>Advokasi dan Pengendalian Penduduk</b>	<b>176.151.332,</b>	<b>158.423.550,-</b>	<b>Persentase Menurunnya Laju Pertumbuhan</b>

					<b>Penduduk (LPP) 1,21%</b>
1	Kegiatan	Advokasi dan KIE Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	70,846,900,-	63.541.900,-	
2	Kegiatan	Monev dan Pendataan Keluarga	23.801.700,-	23.657.500,-	
3	Kegiatan	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	81.502.732,-	71.224.150,-	
<b>IX</b>	<b>Program :</b>	<b>Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Lini Lapangan</b>	<b>2.922.444.220,-</b>	<b>2.148.112.325,-</b>	<b>Persentase Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 1,21%</b>
1	Kegiatan	Operasional bagi Balai Penyuluhan KB (Dak Non Fisik)	958.010.120,-	660.637.380,-	
2	Kegiatan	Operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi ( Alokon ) - ( Dak Non Fisik )	29.065.000,-	22.740.000,-	
3	Kegiatan	Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan lainnya di Kampung KB ( Dak Non Fisik )	862.528.000,-	479.364.000,-	

4	Kegiatan	Operasional Pembinaan Program KKBPK bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD) ( Dak Non Fisik )	262.841.100,-	176.042.945,-	
<b>X</b>	<b>Program :</b>	<b>Meningkatnya Dukungan Sarana Prasarana Pelayanan KB</b>	<b>126.500.000,-</b>	<b>100.050.000,-</b>	
1	Kegiatan	Pengadaan sarana prasarana klinik pelayanan keluarga berencana (DAK Fisik)	126.500.000,-	100.050.000,-	
<b>XI</b>	<b>Program :</b>	<b>Meningkatnya Dukungan Sarana dan prasarana Penyuluhan KB</b>	<b>469.200.000,-</b>	<b>373.010.550,-</b>	
1	Kegiatan	Pengadaan sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan KB (DAK Fisik)	469.200.000,-	373.010.550,-	
<b>T O T A L</b>			<b>6.989.895.433,-</b>	<b>5.620.567.031.</b>	

3) Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran ( Rp) Tahun 2019	Anggaran ( Rp) Tahun 2020	Anggaran (Rp)
	<b>BELANJA DAERAH</b>		<b>BELANJA DAERAH</b>	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA TIDAK LANGSUNG	
	Belanja Pegawai		Belanja Pegawai	3.899.923.600,-
	BELANJA LANGSUNG	5.225.983.786,-	BELANJA LANGSUNG	6.770.732.433,-
<b>I.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	779.998.129,-	<b>Pelayanan Administrasi perkantoran</b>	814.985.554,-
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	65.300.000,-	Penyediaan jasa bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	191.863.900,-
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	19.150.000,-	Penyediaan rapat, konsultasi, dan koordinasi	250.622.861,-
	Penyediaan jasa administrasi keuangan,	6.305.000,-	Penyediaan Jasa Penunjan Kinerja SKPD	372.498.793,-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.393.800,-	—	—
	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	10.659.329,-	—	—
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan,	8.376.400,-	—	—
	Penyediaan komponen instalasi listrik	2.070.200,-	—	—
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.125.000,-	—	—
	Penyediaan makanan dan minuman,	28.617.500,-	—	—
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultan ke luar daerah	230.550.400,-	—	—
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultan ke dalam daerah	76.984.500,-	—	—

	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	343.560.000,-	—	—
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>57.630.000,-</b>	<b>Pemenuhan, Peningkatan Sarana / Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya manusia</b>	<b>110.852.342,-</b>
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15.000.000,-	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	20.150.000,-
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	39.750.000,-	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	90.702.342,-
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.880.000,-	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	0,
	—	—	<b>Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD</b>	<b>7.010.600,-</b>
	—	—	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	3.554.100,-
	—	—	Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan kinerja	3.456.500,-
<b>III.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>0</b>	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0,
<b>IV.</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>263.621.913,-</b>	<b>Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>94,199,720,-</b>
	Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A)	145.690.463,-	—	—
	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	48.026.200,-	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan Anak	94,199,720,-
	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	69.905.250,-	—	—

V.	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	81.427.600,-	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Dan Anak</b>	<b>427.964.640,-</b>
	Pembinaan dan penilaian lomba desa P2WKSS	81.427.600,-	Pembinaan Pemberdayaan Perempuan, Organisasi Perempuan dan Kesetaraan Gender	320.158.735,-
			Pendampingan dan Penanganan Pelindungan Perempuan dan Anak	107.805.905,-
VI	<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</b>	189.280.700,-	—	—
	Pembinaan organisasi perempuan	189.280.700,-	—	—
VII	<b>Program Kerjasama Informasi Dengan Masyarakat Program Kerjasama Informasi Dengan Masyarakat</b>	<b>15.000.000,-</b>	<b>Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Kinerja SKPD</b>	<b>20.000.000,-</b>
	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	15.000.000,-	Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan	20.000.000,-
VIII	<b>Program Keluarga Berencana</b>	408.242.250,-	<b>Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga Sejahtera</b>	<b>1.820.587.025,-</b>
	Advokasi Pelayanan Keluarga	37.500.000,-	Pembinaan Masyarakat Peduli KB dan Kesehatan Reproduksi	0,-
	Pembinaan keluarga berencana	370.742.250,-	Monev Pelayanan KB dan Pengelolaan ALKON	292.329.000,-
	Pembinaan dan Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat peduli KB	18.000.000,-	Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS)	1.472.539.900,-
	—	—	Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	55.718.125,-

	—	—	Advokasi dan Pengendalian Penduduk	176.151.332,-
	—	—	Advokasi dan Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	70,846,900,-
	—	—	Monev dan Pendataan Keluarga	23.801.700,-
	—	—	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Penduduk KB, PP dan PA	81.502.732,-
<b>IX</b>	<b>Program Pembinaan Perantara Masyarakat dan Pelayanan KB/KI yang Mandiri</b>	<b>812.421.950</b>	—	—
	Pengelolaan program KB masyarakat	22.423.600,-	—	—
	Pemberdayaan ekonomi keluarga	29.121.200,-	—	—
	Pembinaan Petugas Pengelola Program KB dan KS	742.315.800,-	—	—
	Pengelolaan data dan informasi program KB	32.000.000,-	—	—
<b>X</b>	<b>Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR</b>	<b>63.923.100</b>	—	—
<b>XI</b>	<b>Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Keluarga) Lini Lapangan (DAK Non Fisik)</b>	<b>1.534.262.380</b>	<b>Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Lini Lapangan</b>	<b>2.922.444.220,-</b>
	Operasional Distribusi alat dan obat kontrasepsi (alkon)-(DAK non fisik)	14.395.000,-	Operasional bagi Balas Penyuluhan KB (Dak Non Fisik)	958.010.120,-

	Dukungan komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) dan manajemen (DAK non fisik)	152.515.000,-	Operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi Alokon ) - ( Dak Non Fisik )	29.065.000,-
	Operasional bagi balai penyuluhan KB (DAK non fisik)	.239.964.000,-	Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan lainnya di Kampung KB (Dak Non Fisik )	862.528.000,-
	Operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya dikampung KB (DAK non fisik)	1.045.000.000,-	Operasional Pembinaan Program KKBPK bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD) (Dak Non Fisik )	262.841.100,-
	Operasional pembinaan program KKBPK bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan SUB PPKBD) (DAK non fisik)	810.000.000,-	<b>Meningkatnya Dukungan Sarana Prasarana Pelayanan KB</b>	<b>126.500.000,-</b>
<b>XII</b>	<b>Program Meningkatkan Dukungan Sarana Penyuluhan KB</b>	353.700.000,-	Pengadaan sarana prasarana klinik pelayanan keluarga berencana (DAK Fisik)	126.500.000,-
	Pengadaan sarana dan transportasi pelayanan penyuluhan KB	353.700.000,-	<b>Meningkatnya Dukungan Sarana dan prasarana Penyuluhan KB</b>	<b>469.200.000,-</b>
			Pengadaan sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan KB (DAK Fisik)	469.200.000,-
	<b>Total</b>	<b>6.252.942.792,-</b>		<b>6.989.895.433,-</b>

Dinas pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2019 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPA-SKPD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.331.259.333,- dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Anggaran pada DPA dan DPPA Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 5.331.259.333,- terdiri untuk :

1. Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) Rp. 5.225.983.786,-
2. Belanja Langsung Rp. 6.252.942.792,-

Alokasi anggaran dimaksud dipergunakan untuk pelaksanaan DALAM RANGKA PENCAPAIAN Sasaran 3 (Tiga) dan indikator sasaran sebanyak 12 (Dua Belas), yaitu :

1. Program Sekretariat :
  - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Program Displin Aparatur
2. Program Pembangunan
  - Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
  - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
  - Program Keluarga Berencana

Sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 realisasi anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut dari alokasi sebesar **Rp. 6.252.942.792,-** terealisasi sebesar Rp. **4.883.954.801,-** dapat sisa anggaran sebesar Rp.1.368.987.991,-/ Sisa anggaran tersebut terdiri dari :

1. Belanja Sekretariat terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 30.780.558,- dari total Rp.779.998.129,- Hal ini dikarenakan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor hanya terserap 58%(4.393,800,- Realisasi Rp.2.559.400,-Keg.Jasa Administrasi Kuanganterealisasi 12%(6.305.000,-Realisasi Rp.732.000.)Keg. penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor terserap 100% (.070.200 Realisasi Rp.2.060.000), Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional terserap 75%(39.750.000 Realisasi Rp.29.930.000). Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor terserap 66%(2.880.000 Realisasi Rp.1.895.000).

2. Bidang Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) sisa Anggaran Rp. 65.713.813,- dari total sebesar Rp.145.690.463,- terealisasi sebesar Rp.79.976.650,- (55%) Hal ini sisa dana psikolog dan sisa perjalanan dinas.
3. Pembinaan Organisasi Perempuan sisa Anggaran Rp. 49.246.800,- dari total sebesar Rp.189.280.700,- terealisasi sebesar Rp.140.033.900,- (74%) Hal ini sisa perjalanan dinas.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **C. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut berkaitan dengan penyelenggaraan pada tahun 2020 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari Indikator Kinerja Sasaran Renstra Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut 2019-2023, dapat diuraikan sebagai berikut :

- SASARAN 1** : Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dengan indikator adalah :  
Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) realisasi 1,21 dari target 1,66 dengan capaian kinerja 72,89%.
- SASARAN 2** : Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS 15-49 tahun dengan indikator adalah :  
Persentase Total Fertility Rate (TFR) realisasi 2,99% dari target 2,33% dengan capaian kinerja 126,32%
- SASARAN 3** : Meningkatnya Kesetaraan Gender dengan indikator adalah :  
Persentase Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) realisasi 65,96% dengan capaian kinerja 96,43%

- SASARAN 4 : Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dengan indikator adalah :  
Skor capaian Kota Layak Anak (KLA) realisasi skor 551 (Pratama ) dari target 700 (Madya) dengan capaian kinerja 78,71%.
- SASARAN 5 : Meningkatnya penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan realisasi sebesar 100 dari target 100 % dengan capaian kinerja 100%.
- SASARAN 6 : Meningkatnya pemahaman remaja tentang ber KB dengan indikator prosentase Pasangan Usia Subur yang ber-KB dengan target 90% terealisasi 80.60% dengan capaian kinerja.
- SASARAN 7 : Meningkatnya pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera(KS) dengan indikator Prosentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet-Need) realisasi sebesar 8,12 % dari target 9,00 % dengan capaian kinerja 90,22 %.
- SASARAN 8 : Meningkatnya penyelesaian pengaduan tindak kekerasan perempuan dan Anak indikator prosentase penanganan pengaduan perempuan anak korban tindak kekerasan teralisasi 100% tertindak lanjuti dari jumlah 34 kasus .
- SASARAN 9 : Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran dengan indikator 5 indikator yaitu : 1. Jumlah layanan administrasi perkantoran sesuai SOP terealisasi 100%, 2.Jumlah sarana prasarana kantor yang dipenuhi sesuai aturan terealisasi 100%,3. Jumlah sarana prasarana kantor yang terpelihara dan dimanfaatkan terealisasi 100%, 4.Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang disusun tepat waktu

teralisasi 100% ( 6 Dokumen) dari target 6 dokumen  
,5. Jumlah dokumen laporan kinerja teralisasi 100%  
( 5 dokumen ) dari target 5 dokumen.

## **B. KENDALA YANG DIHADAPI ATAS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Kendala yang menjadi perhatian bagi Dinas pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mencapai sasaran strategis adalah :

- Belum optimalnya melaksanakan sosialisasi pengolahan data melalui jalur Formal dan Informal di setiap Desa / Kelurahan;
- Masih rendahnya memberikan wawasan, sikap, pengetahuan dan keterampilan tentang program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga ( KKBPK) kepada akseptor /Pasangan Usia Subur.
- Peserta PUS yang ber KB masih belum banyak memakai alat kontrasepsi jangka panjang (IUD dan Implant) serta kontrasepsi mantab (MOW dan MOP);
- Kurangnya tenaga penyuluh / PLKB dimana seharusnya 1 PLKB menangani 1 desa, akan tetapi kondisi saat ini 1 PLKB menangani 3 sampai 4 desa ;
- Masih rendahnya keterlibatan lintas sektoral dalam pengarusamaan gender ( PUG);
- Kelembagaan PUG belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
- Masih kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai pentingnya pengintegrasian persepektif gender disemua bidang dan tahanan pembangunan.

- Belum optimalnya sosialisasi mengenai pemenuhan hak perempuan dan anak, sehingga tindak kekerasan sering terjadi pada perempuan dan Anak;
- Belum optimalnya tata kelola administrasi perkantoran pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut.

### **C. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA**

Langkah – langkah kedepan yang akan dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut untuk meningkatkan kinerjanya adalah :

- Melaksanakan Advokasi Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE ) secara keliling dengan menggunakan fasilitas mobil pelayanan (MUPEN);
- Siaran lewat Siaran radio tentang Kependudukan , Memasang Spanduk-spanduk, mencetak Brosur dan Leaflet di bagi ke sekolah-sekolah dan Puskesmas di setiap kecamatan;
- Melaksanakan sosialisasi materi kependudukan melalui jalur Formal dan Informal di setiap Kecamatan / Sekolah ;
- Penambahan formasi PLKB ;
- Peningkatan penyuluhan secara berkesinambungan kepada PUS melalui komunikasi, informasi, dan edukasi secara tatap muka serta pelayanan KB gratis dengan pola jemput bola langsung kepada sasaran;
- Siaran program Kb melalui media elektronik, media cetak ( siaran Radio, brosur,Leaflet dan Spanduk).
- Melakukan sosialisasi keterlibatan lintas sektoral dalam pengarusutamaan gender ( PUG);

- Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
- Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai pentingnya pengintegrasian persepektif gender disemua bidang dan tahan pembangunan.
- Melakukan pembuatan akte kelahiran secara gratis;
- Melaksanakan pendataan anak putus sekolah ( Dop-Out) dgn dinas terkait;
- Melakukan sosialisasi lintas sektoral mengenai pemenuhan hak anak

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 yang dapat disajikan sebagai pertanggung jawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaihari, Agustus 2020

Pt. Kepala Dinas P2KBP3A  
Kabupaten Tanah Laut,

**Drs. ZAINAL ABIDIN**

NIP. 19641013 198603 1 012